

Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Nusantara III Lantai 4. Komplek Gedung MPR / DPR / DPD RI
Jalan Gatot Subroto, Senayan
Telp: 021-5715515; Faks: 021-5715513
Email: ksbbksap@dpr.go.id
Website: www.dpr.go.id
Facebook: DPRRI; Twitter: @DPR-RI; Youtube: DPR RI; Instagram: @bksapdpr

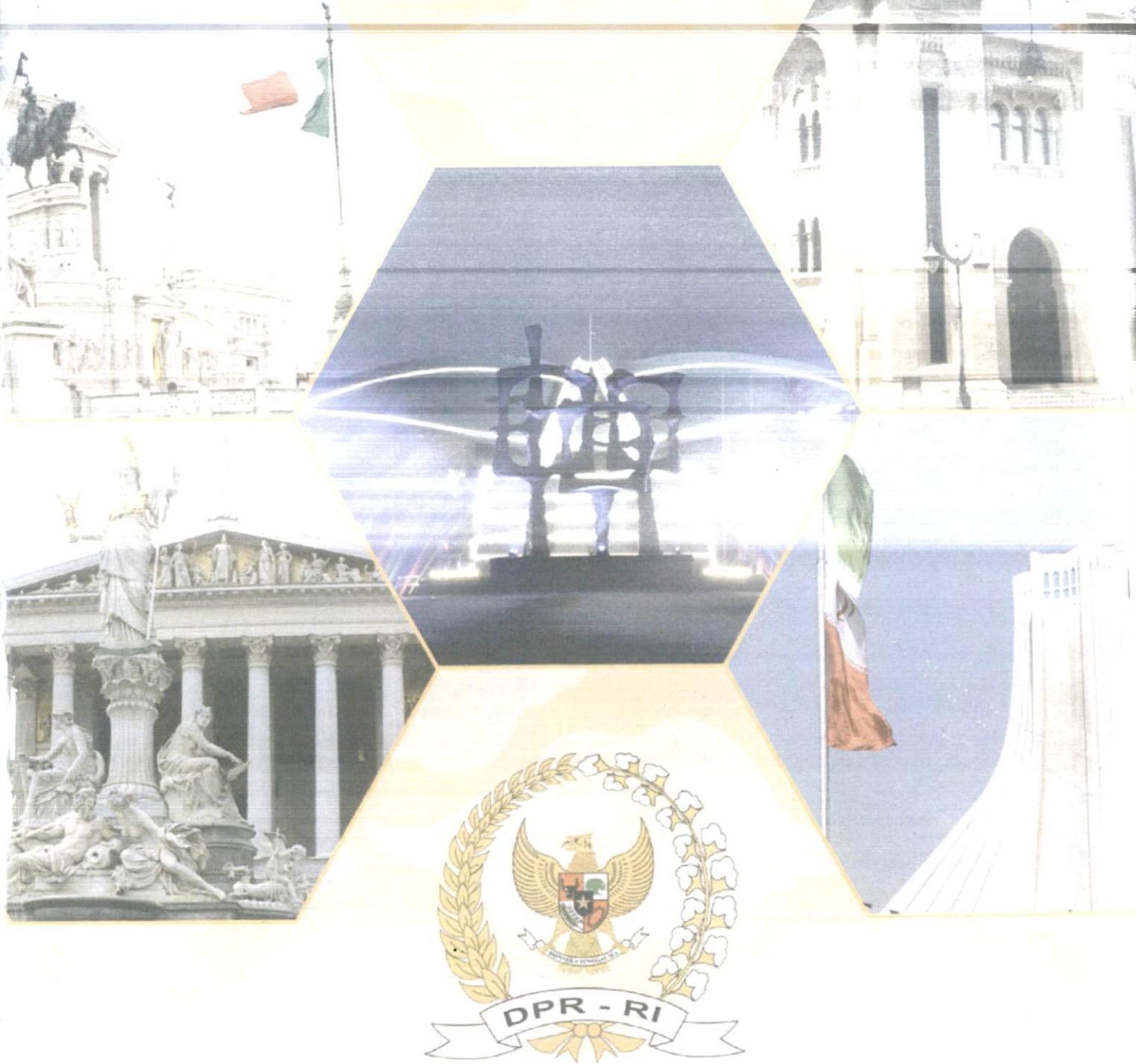
HIMPUNAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA GRUP KERJA SAMA BILATERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015



HIMPUNAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSBB) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015





HIMPUNAN LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA
GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSBB)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN ITALIA, TANGGAL 22 – 28 NOVEMBER 2015	3
LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN LEBANON, TANGGAL, 10 – 16 DESEMBER 2015	19
LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN IRAN, TANGGAL, 12 – 18 DESEMBER 2015	75
LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI – PARLEMEN AUSTRIA, TANGGAL, 13 – 19 DESEMBER 2015	91



**LAPORAN
DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR RI – PARLEMEN ITALIA
KE ITALIA
TANGGAL, 22 – 28 NOPEMBER 2015**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015**

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR RI – PARLEMEN ITALIA
KE ITALIA
TANGGAL 22 – 28 NOVEMBER 2015

I. PENDAHULUAN

A. Pengiriman Delegasi

Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 13/PIMP/I/2015 tanggal 20 November 2015.

B. Susunan Delegasi

1. **Hj. Melanie Leimena Suharli.** /Ketua GKSB/Ketua Delegasi/-FPD
2. **H. John Kenedy Azis. SH**/Anggota GKSB/F-PG
3. **Drs. H. Guntur Sasono. M.Si**/Anggota GKSB/F-PD
4. **Yanuar Prihatin. M.Si**/Anggota GKSB/F-PKB
5. **H.M. Amir Uskara. M.Kes**/Anggota GKSB/F-PPP
6. Elvira Dianti Amris, S.S., M.Si./Sekretaris delegasi
7. Novri Helmawan, S.S/Sekretaris delegasi

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Adapun maksud dilakukannya kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Italia ke Italia adalah untuk :

- a. Mempererat hubungan kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen Italia;
- b. Mendorong meningkatnya optimalisasi hubungan kerjasama RI – Parlemen Italia di berbagai bidang;
- c. Menjajaki potensi dan peluang kerjasama RI – Italia yang saling menguntungkan bagi kepentingan kedua negara khususnya dibidang Usaha Kecil dan Menengah.

D. Misi Delegasi

Misi delegasi GKSBDPR RI ke Italia adalah :

- a. Diperolehnya informasi mengenai langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kerjasama parlemen antar kedua negara.
- b. Dipahaminya perkembangan kondisi terkini dari situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya Italia yang akan menjadi bahan referensi bagi Indonesia dalam meningkatkan kerjasamanya dengan Italia.
- c. Dicapainya kesepahaman antara kedua parlemen mengenai upaya pemanfaatan bersama dari potensi dan peluang kerjasama kedua negara.

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan

- a) Merumuskan maksud dan tujuan kunjungan, serta menentukan pihak-pihak yang akan ditemui selama berada di Italia.
- b) Melakukan koordinasi dengan KEMLU RI untuk memperoleh masukan dan informasi terakhir tentang Republik Italia serta pending matters antara RI – Republik Italia.

II. ISI LAPORAN

A. Pertemuan dengan Duta Besar R.I untuk Republik Italia, Bapak August Parengkuhan beserta jajarannya, Konsul Kehormatan (KONHOR) Indonesia serta Perwakilan Asosiasi Persahabatan Italia - Indonesia, Minggu, 22 November 2015

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Delegasi, Duta Besar R.I untuk Republik Italia beserta jajarannya, Konsul Kehormatan Indonesia di Napoli Mr. Tessa dan perwakilan Asosiasi Persahabatan Italy - Indonesia. Pertemuan diawali dengan perkenalan Delegasi dengan para hadirin. Dalam pertemuan ini disampaikan tentang agenda kunjungan Delegasi yaitu pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen (Senat) Italia – Indonesia, Pertemuan dengan Komisi Urusan Luar Negeri dan Komunitas Eropa, Wakil Menteri Luar Negeri Italia, KADIN Fashion Milan dan Ketua Asosiasi Permesinan

Tekstil Italia di Milan. Dalam sambutannya, Duta Besar R.I. untuk Republik Italia menyampaikan informasi seputar Italia dan kerjasama yang telah dijalankan dengan Indonesia. Penduduk Italia berjumlah 60 (enam puluh) juta jiwa. 2.200 (dua ribu dua ratus) jiwa diantaranya berasal dari Indonesia yang pada umumnya merupakan ibu rumah tangga yang bersuamikan orang Italia. Sektor perekonomian di Italia banyak didukung oleh bisnis keluarga yang menyokong perekonomian Italia. Selain itu, dari sektor pariwisata setiap tahunnya Italia dikunjungi oleh 57 (lima puluh tujuh) wisatawan asing. Produk militer Italia terkenal adalah alutsista seperti helikopter. Kerjasama Indonesia dan Italia yang sedang dirintis pada saat ini adalah pengembangan ekonomi kreatif dan pemberian beasiswa LPDP. Di bidang perdagangan terdapat surplus Indonesia di sektor kelapa sawit.

Ketua Delegasi, Ibu Melani Leimena Suharli menyampaikan apresiasinya kepada Duta Besar beserta jajarannya atas terlaksananya kunjungan GKSBDPR RI – Parlemen Italia ke Italia. Disampaikan pula bahwa Delegasi menghargai atas usaha-usaha atau terobosan-terobosan yang telah dilakukan KBRI Italia untuk mempromosikan kerjasama kedua negara. Delegasi berharap kiranya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KBRI dapat terus ditingkatkan guna peningkatan hubungan kerjasama Indonesia – Italia khususnya di bidang perdagangan dan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan bahwa di era multitrack diplomacy sekarang ini, pemerintah dengan para diplomat resminya bukanlah satu-satunya aktor politik luar negeri. Di era ~~yang~~ ~~multitrack~~ ~~diplomacy~~, ~~Parlemen~~ ~~negara~~ ~~terlibat~~ ~~aktif~~, mendukung atau pun terlibat aktif dalam pelaksanaan diplomasi (second track diplomacy) untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di dunia baik secara personal, bilateral, regional maupun multilateral atau yang disebut dengan contact people to people. Begitu juga dengan issue-issue yang dibahas tidak hanya issue-issue tradisional tetapi muncul issue-issue lain seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan, hak asasi manusia, kerjasama ekonomi dan perdagangan, maritim juga menjadi sasaran diplomasi pada saat ini. Ketua Delegasi menggaris bawahi tentang pentingnya menjalin kerjasama dengan Italia karena banyak yang dapat digali dari negara ini, salah satunya di bidang fashion dimana UKM Italia yang terkenal dengan mutu produknya yang telah mendunia dan mampu menjadi penyokong

perekonomian nasional. Untuk itu, delegasi GKSBN ingin menjajaki kerjasama yang dapat dikembangkan antara Indonesia – Italia khususnya dibidang industri kreatif UKM/*fashion*.



Suasana pertemuan Delegasi GKSBN DPR RI – Parlemen Italia dengan KBRI Roma

Delegasi juga mengadakan dialog dengan para hadirin yang membahas tentang tugas-tugas keparlemenan yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Pertemuan diakhiri dengan jamuan makan malam oleh Duta Besar RI untuk Republik Italia yang diadakan di KBRI Roma.

B. Pertemuan dengan Benedetto della Vedova, Wakil Menteri Luar Negeri Italia, Selasa, 23 November 2015.

Dalam pertemuan ini dibahas tentang kehidupan saling menghormati di Indonesia dengan semboyan Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi panutan hidup di Indonesia yang dapat merangkul berbagai latar belakang suku, agama dan budaya masyarakat.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan harmonis dengan masyarakat agama lain. Hal ini perlu menjadi contoh dan model bagi negara lain khususnya di Eropa.



Pertemuan delegasi GKSB dengan Wakil Menteri Luar Negeri Italia

Delegasi menyampaikan posisi Indonesia terhadap keberadaan ISIS. ISIS tidak mencerminkan ajaran Agama Islam. Indonesia mengutuk serangan dan aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS. Islam merupakan agama yang damai dan penuh cinta kasih, sehingga apa yang dilakukan oleh ISIS dan semua tindakan terorisme tidak mencerminkan agama Islam. Para teroris yang mengatasnamakan agama adalah orang yang tidak paham atas ajaran agamanya.

Italia sangat menghargai Indonesia yang telah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi bukanlah hal yang bertentangan, tetapi di dalam Islam juga terdapat demokrasi. Indonesia dan Italia perlu meningkatkan hubungan politik, khususnya untuk saling belajar mengenai toleransi, demokrasi dan Islam, serta interfaith dialogue .

Dalam pertemuan ini juga terungkap keinginan Italia untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasinya, khususnya untuk meningkatkan investasi Italia di Indonesia untuk pasar domestik dan regional ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Under Secretary Kementerian Luar Negeri Italia, yang melihat Indonesia sebagai potensi besar investasi Italia di kawasan Asia Tenggara.

Delegasi menyampaikan pula keinginan untuk mengenali pengembangan UKM dan ekonomi kreatif Italia termasuk food, fashion dan furniture. Terkait

dengan bisnis makanan, pihak Italia menyarankan tidak hanya memperhatikan makanannya saja tetapi juga teknologi pengolahan dan packaging makanan untuk keamanan makanan tersebut.

Dalam pertemuan ini Delegasi juga menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Italia untuk mendukung proposal Indonesia terkait pembebasan visa schengen bagi WNI pemegang paspor biasa. Wakil Menteri Luar Negeri Italia Bapak Benedetto della Vedova menyampaikan bahwa saat ini negara-negara anggota schengen tengah membahas kembali upaya untuk memperketat perbatasan bahkan ada yang mengusulkan untuk menunda penerapan Schengen Treaty di tengah kondisi Eropa yang sedang mencekam pasca serangan Paris pada 13 November 2015. Namun demikian, posisi Italia tegas dan jelas agar Perjanjian Schengen harus terus berlangsung dan tidak perlu ada penghentian sementara. Italia berpandangan negara anggota Schengen dan EU perlu memperketat perbatasan dengan negara di luar Eropa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengingat situasi Eropa saat ini tampaknya belum tepat untuk mengajukan usulan pembebasan visa schengen. Mungkin dimasa yang akan datang saat kondisi keamanan membaik, usulan ini dapat diajukan kembali oleh Indonesia.

C. Pertemuan dengan Ketua Komisi III Senat Italia dan Kelompok Persahabatan Senat Italia – DPR RI , Hon. Mr. Piero Fernando Cassini, Selasa, 26 November 2015

Dalam sambutannya, Ketua Komisi III Senat Italia mengungkapkan rasa senangnya atas kunjungan Presiden Italia ke Indonesia untuk menjalin kerjasama dibidang interfaith dialogue karena Indonesia mempunyai visi yang sama memerangi terorisme. Italia juga ingin mengimplementasikan kerjasama ekonomi dengan berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Italia ingin memperkuat kerjasamanya di bidang ini. Lebih jauh Beliau menyampaikan keinginan Italia untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia yang sudah ada terutama dalam hal saling berbagi pengalaman bagaimana mengelola hidup berdampingan dengan masyarakat yang heterogen, berbeda agama dan budaya. Anggota parlemen Italia juga menanyakan tentang konflik Aceh, apakah murni konflik politik atau konflik agama.



Pertemuan delegasi GKSBI dengan Komisi III Senat Italia dan Kelompok Persahabatan Senat Italia – DPR RI

Menanggapi anggota parlemen Italia, Ketua Delegasi Ibu Melani Leimena Suharli menyampaikan bahwa Indonesia dapat bersatu karena azas Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu. Terkait dengan isu Aceh dijelaskan hal itu merupakan murni konflik politik. Belajar dari pengalaman tersebut, Indonesia ingin memajukan wilayah yang pembangunannya masih tertinggal seperti di Papua dan Indonesia timur lainnya. Indonesia ingin meningkatkan kesejateraan wilayah tersebut, oleh karena itu Presiden Joko Widodo ingin Italia ikut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan di Indonesia Timur.

D. Pertemuan dengan Hon. Mr. Fabrizio Cicchitto, Ketua Komisi III (Urusan Luar Negeri dan Komunitas Eropa) Parlemen Italia, Selasa, 24 November 2015.

Hon. Mr. Fabrizio Chicchitto membuka pertemuan dengan menjelaskan tentang politik luar negeri Italia yang sedang fokus pada Uni Eropa dan Timur Tengah. Fokus yang dibahas dengan Uni Eropa adalah mata uang tunggal Eropa dan hegemoni Jerman. Sedangkan dengan Timur Tengah adalah realitas Islam minoritas di Eropa terutama semenjak adanya ISIS. Italia menilai bahwa Serangan ISIS di Paris pada tanggal 13 November 2015

bukan lagi dianggap sebagai tindakan terorisme tetapi sudah merupakan tindakan perang. Oleh karena itu, Perancis akan melakukan "perang" kepada ISIS.

Menurut Mr. Cicchitto pada saat ini terdapat 600 (enam ratus) penduduk muslim di Italia. Diantaranya terdapat penduduk Italia yang masuk Islam dan ada juga penduduk muslim yang berasal dari negara-negara Islam. Oleh karena itu, Italia ingin menggali harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia dan bertukar pikiran lebih jauh dengan Indonesia terkait dengan hal ini karena Indonesia bisa menjadi contoh bagi Islam yang pluralis.



Foto Bersama Delegasi GKSBN dengan Komisi III
(hubungan luar negeri) Parlemen Italia

Walaupun begitu, delegasi menyampaikan pandangannya bahwa Islam di Indonesia tidak sama dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Islam di Indonesia menjadi pelindung bagi kelompok minoritas. Islam yang sebenarnya adalah rahmat bagi semua alam. Islam bukanlah agama kekerasan, tetapi ada sebagian kecil kelompok orang demi kekuasaan menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Meski Islam merupakan agama terbesar di Indonesia tetapi tidak menganut sebagai Islamic state. Islam bisa harmonis dengan kelompok minoritas karena mempunyai satu pandangan hidup yaitu Pancasila.

Selain itu, delegasi juga ingin membangun kerjasama lebih dekat dengan Italia yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Oleh karena itu, delegasi mengundang Italia melalui parlemennya untuk berpartisipasi dalam investasi membangun infrastruktur dan ekonomi kreatif di Indonesia mengingat Italia terkenal dengan ekonomi kreatifnya.

Diakhir pertemuan, parlemen Italia mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah berbagi pengalaman tentang hidup berdampingan, semoga Italia dan Indonesia dapat bekerjasama dalam masalah ini.

E. Pertemuan dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Fashion Milan (Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), Mr. Carlo Capasa, Kamis, 26 November 2015.

Mr. Carlo Capasa menjelaskan tentang institusi CNMI yang didirikan pada tahun 1958 dan semenjak didirikannya lembaga ini, fashion Italia sukses dan terkenal diseluruh dunia. Lembaga ini merupakan nilai tertinggi di dunia gaya dan mode Italia. Tujuan didirikannya CNMI adalah untuk menjaga, mengoordinasikan, mengelola, menyebarkan dan memperkuat mutu dan imej fashion Italia baik di Italia maupun di seluruh dunia.

CNMI merupakan asosiasi non-profit dengan kantor pusat di Milan yang merupakan pusat 200 (dua ratus) perusahaan top Italia yang mengelola pembuatan pakaian jadi, pakaian houte couture, produk kulit, kosmetik dan lain-lain.



Anggota CNMI merupakan pemegang brand ternama di dunia mode Italia seperti Armani, Bottega Veneta, Emilio Pucci, Etro, Fendi, Gucci, Missoni, OTB, Prada, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Trussardi, Valentino, Versace. Manajemen CMNI terdiri dari 15 direktur yang terdiri dari pengusaha dan manajer yang merupakan perwakilan dari pemilik butik pakaian yang diketuai oleh Carlo Capasa.

Dalam diskusi ini juga dijelaskan tentang kerjasama fashion yang telah dijalin dengan Indonesia yaitu permintaan aksesoris untuk tas-tas merek terkenal Italia. CNMI bersedia memberikan pelatihan atau berbagi pengalaman dengan Indonesia tentang bagaimana pengembangan industri kreatif khususnya di bidang fashion.

**F. Pertemuan dengan Direktur Asosiasi Permesinan Tekstil Italia (ACIMIT),
Mr. Federico Pellegata, Kamis, 26 November 2015.**



Pertemuan delegasi GKSBI dengan Ketua Asosiasi Permesinan Tekstil Italia

Asosiasi Permesinan Tekstil Italia (ACIMIT) sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi Tekstil Indonesia yang berada di Bandung guna memberikan pelatihan tentang permesinan yang memproduksi tekstil. Diharapkan para lulusan perguruan tinggi ini mempunyai skill yang bagus untuk memproduksi tekstil dan dapat bekerja didalam maupun di luar negeri.

Selama ini pihak ACIMIT telah menjalin komunikasi dengan salah satu Direktur pada Dirjen Industri Manufacturing Departemen Perindustrian Indonesia yaitu Bapak Ramon Bangun. Pihak ACIMIT meminta kiranya kerjasama ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh pihak terkait di Indonesia.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kunjungan Delegasi GKSBN DPR RI – Parlemen Italia ke Italia secara keseluruhan berjalan dengan baik dan hubungan antara Italia dan Indonesia memang cukup baik.
2. Selama kunjungan, terlihat bahwa pihak-pihak yang ditemui oleh delegasi selama berada di Republik Italia terutama pihak Parlemen Italia dan pemerintah Italia antusias untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, utamanya dibidang perdagangan kedua negara karena Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

B. SARAN

Dari beberapa hasil kunjungan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan tindaklanjuti sebagai berikut:

1. Italia ingin meningkatkan hubungan perdagangan dan investasinya, khususnya untuk meningkatkan investasi Italia di Indonesia untuk pasar domestik dan regional ASEAN.
2. Delegasi menyampaikan pula keinginan untuk mengenali pengembangan UKM dan ekonomi kreatif Italia termasuk food, fashion dan furniture.
3. Permintaan Indonesia kepada Pemerintah Italia untuk mendukung proposal Indonesia terkait pembebasan visa schengen bagi WNI pemegang paspor biasa, mengingat situasi Eropa saat ini tampaknya belum tepat untuk mengajukan usulan pembebasan visa schengen. Mungkin dimasa yang akan datang saat kondisi keamanan membaik, usulan ini dapat diajukan kembali oleh Indonesia.

4. KADIN Fashion Italia yang berada di Milan bersedia bekerjasama dengan Indonesia dalam memberikan pelatihan tentang pengembangan ekonomi kreatif khususnya dibidang fashion.
5. Asosiasi Permesinan Tekstil Italia (ACIMIT) sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi Tekstil Indonesia yang berada di Bandung guna memberikan pelatihan tentang permesinan yang memproduksi tekstil. Diharapkan para lulusan perguruan tinggi ini mempunyai skill yang bagus untuk memproduksi tekstil dan dapat bekerja didalam maupun di luar negeri. Selama ini pihak ACIMIT telah menjalin komunikasi dengan salah satu Direktur pada Dirjen Industri Manufacturing Departemen Perindustrian Indonesia yaitu Bapak Ramon Bangun. Pihak ACIMIT meminta kiranya kerjasama ini dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan oleh pihak terkait di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Ucapan Terima kasih

Delegasi GKSBDPR RI – Parlemen Italia yang telah berkunjunga ke Italia tanggal 22 – 28 November 2015 mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan dari semua pihak selama Delegasi melaksanakan tugas sehingga kunjungan kerja tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, ucapan terimakasih tersebut kami tujukan kepada :

1. Kedutaan Besar RI untuk Republik Italia di Roma;
2. Kedutaan Besar Republik Italia di Jakarta;
3. Ketua Komisi III Senat Italia dan Kelompok Persahabatan Senat Italia – DPR RI;
4. Komisi III (Urusan Luar Negeri dan Komunitas Eropa) Parlemen Italia;
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Fashion Milan (Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI));
6. Ketua Asosiasi Permesinan Tekstil Italia.

B. Kata Penutup

Kunjungan Delegasi GKSBDPR RI Parlemen Italia ke Republik Italia telah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh program kegiatan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan baik dan dalam kondisi yang aman sehingga delegasi dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.

Jakarta, Desember 2015
GKSBDPR RI – Parlemen Italia
Ketua Delegasi

ttd

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI
A-413



**LAPORAN
DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR RI – PARLEMEN LEBANON
KE LEBANON
TANGGAL, 10 – 16 DESEMBER 2015**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015**

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA DELEGASI GRUP KERJASAMA
BILATERAL (GKS B)
DPR-RI – PARLEMEN LEBANON
10 – 16 DESEMBER 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pengiriman Delegasi :

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKS B) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Lebanon untuk melakukan kunjungan ke Lebanon pada tanggal 10 – 16 Desember 2015.

Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKS B) DPR RI – Parlemen Lebanon ke Lebanon dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 15/PIMP/II/2015 tanggal 23 November 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Lebanon ke Lebanon dari tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015.

B. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKS B) DPR RI – Parlemen Lebanon adalah :

1. Irgan Chairul Mahfiz /Ketua Delegasi/F.PPP
2. Ono Surono, ST /Anggota GKS B Parlemen Lebanon/F.PDIP

3. Drs. Popong Otje Djunjungan /Anggota GKS B Parlemen Lebanon/F.PG
4. H. Iwan Kurniawan, SH /Anggota GKS B Parlemen Lebanon/F.P.GERINDRA
5. H.Sungkono /Anggota GKS B Parlemen Lebanon/F.PAN

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Lebanon adalah :

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Lebanon
- b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara.
- c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama antara kedua negara.

D. Tujuan Delegasi

Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKB) ke Lebanon pada tahun 2018 pada akhirnya menjadi sebuah kesuksesan yang luar biasa dalam kerjasama dengan lembaga kerja parlemen Lebanon. Selain itu kerjasama dengan lembaga kerja parlemen Lebanon juga berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antara kedua negara.

E. Penutupan Perdamaian Tonggong Yapat

Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan-pertemuan internal dan komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri R.I. dan KBRI setempat dengan tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai isu-isu penting/pending matters terkait hubungan bilateral Parlemen Lebanon ke Lebanon.

II. ISI LAPORAN

BACKGROUND INFORMATION

HUBUNGAN BILATERAL RI – REPUBLIK LEBANON

I. PETA NEGARA





II. DATA UTAMA REPUBLIK LEBANON

Nama Negara	Republic of Lebanon (Inggris), al-Jumhuriyah al-Lubnaniyah (Arab)
Ibukota Negara	Beirut
Kepala Negara	n/a (presiden sebelumnya, Michel Sleiman telah mengakhiri masa tugasnya pada 25 Mei 2014, dan sampai saat ini belum terdapat pengganti)
Kepala Pemerintahan / Perdana Menteri	Tammam Salam (April 2013)
Menteri Luar Negeri	Gebran Bassil (15 Februari 2014)
Luas Wilayah	10.450 km ² (Bank Dunia)
Penduduk	4,467 juta (2013, Bank Dunia)
Mata Uang	Lebanese Pound (LBP)
GDP	US\$ 44,35 miliar (2013, Bank Dunia)
GDP per kapita (PPP)	US\$ 9.870 (2013, Bank Dunia)
Pertumbuhan GDP	2,5% (2014, Biro Statistik Lebanon)

III. HUBUNGAN BILATERAL RI – REPUBLIK LEBANON

Hubungan Diplomatik	:	Pembukaan hubungan diplomatik tanggal 29 Juli 1947
Perwakilan Diplomatik	:	<ul style="list-style-type: none"> • KUAI Lebanon untuk RI, Mrs. Joanna Maria Azzi • Dubes RI untuk Lebanon, H.E. Mr. Ahmad Chozin Chumaidy
Data Perdagangan RI – Lebanon (Menurut Kemdag RI)	:	<p>Volume perdagangan 2014: US\$ 77,89 juta 2013: US\$ 76,91 juta</p> <p>Ekspor RI ke Lebanon 2014 : US\$ 74,16 juta 2013: US\$ 75,86 juta</p> <p>Impor RI dari Lebanon 2014 : US\$ 3,72 juta 2013: US\$ 1,04 juta</p> <p>Neraca Perdagangan 2014: surplus US\$ 70,43 juta 2013: surplus US\$ 74,81 juta</p>
Ekspor Utama RI ke Lebanon	:	Kertas ; pulp (kertas, tisu, dll); Produk olahan kayu dan furniture (fibreboard, furniture rotan, kayu, bamboo, handicraft); Arang batok kelapa/wood charcoal (arang batok kelapa); Tekstil (pakaian jadi); Kendaraan bermotor roda empat (Toyota Astra); Produk plastik (alat rumah tangga, dll); Produk olahan karet (ban, dll); Produk makanan jadi (kopi instan, mie instan, dried coconut powder); Ikan hias; Sepatu / alas kaki
Impor Utama RI dari Lebanon	:	Metal scrap; Produk olahan susu (keju ; yoghurt; dll)
Jumlah WNI (data KBRI Beirut as of September 2014)	:	148 orang

IV. HUBUNGAN PERDAGANGAN LEBANON DENGAN ASEAN (2014)*

Rank	Partner	Impor	Ekspor	Total
1	Thailand	258.064	3.596	261.660
2	Viet Nam	113.506	450	113.956
3	Malaysia	100.016	2.226	102.242
4	Indonesia	98.467	1.707	100.174
5	Singapura	33.992	875	34.867
6	Filipina	9.710	222	9.932
7	Kamboja	9.244	0	9.244
8	Myanmar	1.150	67	1.217
9	Laos	165	0	165
10	Brunei Darussalam	0	131	131

*sumber: ITC calculation based on UN COMTRADE, dalam ribu dolar AS

V. PERKEMBANGAN DALAM NEGERI REPUBLIK LEBANON

Politik dan Keamanan

1. Menyusul pengunduran diri Najib Mikati, pada April 2013, Tammam Salam terpilih sebagai PM Lebanon yang baru.
2. Sepanjang tahun 2013, terdapat berbagai serangan bom di beberapa wilayah di Lebanon. Diantaranya adalah ledakan bom pada tanggal 15 Agustus 2013 di Rouweiss, yang merupakan insiden paling mematikan sejak tahun 2005. Insiden ini telah mengakibatkan tewasnya 24 orang dan menderai 300 orang.
3. Selain itu, Pada tanggal 23 Agustus 2013, dua ledakan bom mobil secara beruntun terjadi masing-masing di masjid Al Taqwa dan Masjid Al Salam di kota Tripoli, Lebanon Utara. Ledakan bom tersebut telah mengakibatkan sekitar 47 korban tewas, dan 500 orang luka-luka. Berbagai kalangan di Lebanon menyatakan bahwa bom tersebut sebagai konspirasi bertujuan menciptakan fitnah sektarian antara penganut Islam di Lebanon, khususnya antara Sunni dan Syiah.
4. Pesawat tempur Israel pada 23 Agustus 2013 dinihari telah membom desa

Naameh yang terletak 15 km arah selatan kota Beirut, namun tidak terdapat korban jiwa. Israel menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan balasan dari militer Israel terhadap peluncuran 4 roket Katyusha yang dilakukan dari wilayah Tyre, Lebanon Selatan ke kota Naharia dan Akka, Israel Utara pada 22 Agustus 2013 sore.

5. Insiden bom bunuh diri lainnya juga terjadi di depan Kedubes Iran pada 19 November 2013, di Beirut. Dalam insiden tersebut, sebanyak 25 orang tewas, termasuk 1 diplomat Iran dan 150 lainnya luka-luka.
6. Mantan Menteri Keuangan dan juga penasehat mantan PM Saad Hariri, Mohammad Shatah dan 5 orang lainnya tewas dalam ledakan sebuah bom mobil di pusat kota Beirut pada 27 Desember 2013. Bom mobil tersebut ditujukan terhadap iring-iringan kendaraan Mohammad Shatah yang akan menghadiri pertemuan koalisi "14 Maret" di kediaman Saad Hariri. Ledakan bom juga menciderai 71 orang lainnya dan menyebabkan kerusakan sejumlah gedung.
7. Pada 15 Februari 2014, PM Tammam Salam mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil membentuk kabinet baru setelah melakukan berbagai upaya pembicaraan maupun perundingan dengan berbagai pihak selama 10 bulan terakhir.
8. Pada tanggal 24 Mei 2014, Presiden Michel Sleiman menyampaikan farewell speech-nya sebelum mengakhiri masa jabatannya pada hari berikutnya. Presiden Sleiman menyampaikan bahwa dirinya menolak untuk memperpanjang masa jabatan jika setelah 25 Mei 2014 nanti tidak ada presiden baru terpilih. Sampai saat ini, Lebanon belum berhasil memilih presiden baru.
9. Lebanese Armed Forces (LAF) bertempur dengan kelompok Nusra Front dan Fajr al-Islam yang berafiliasi dengan ISIS di kota Arsal di Provinsi Bekaa, Lebanon Timur, pada awal bulan Agustus 2014 yang telah menewaskan 16 anggota LAF termasuk 3 orang perwiranya, dan lebih kurang 60 militer Islam tewas dalam pertempuran yang berlangsung selama 5 hari sejak 2 Agustus 2014 tersebut.
10. Selain itu, pada akhir Oktober 2014, LAF kembali terlibat konflik terbuka

dengan kelompok Nusra Front, di wilayah Tripoli, Lebanon Utara, yang menyebabkan tewasnya 11 tentara dan 22 militer.

11. Pada November 2014, Parlemen Lebanon menyetujui perpanjangan mandatnya sampai 2017, dikarenakan alasan keamanan terkait dengan konflik yang tengah berlangsung di Suriah. Sebanyak 95 dari 97 anggota parlemen yang hadir menyetujui perpanjangan tersebut. Perpanjangan mandat tersebut merupakan penundaan pemilu parlemen yang kedua kalinya, dimana pemilu dimaksud seharusnya dilaksanakan pada Juni 2013. Terkait dengan perpanjangan mandat tersebut, beberapa pihak mengkritik langkah tersebut, termasuk Uni Eropa dan Ketua komunitas Kristen Maronite.
12. Pada tanggal 11 Januari 2015, terjadi pemboman bunuh diri di sebuah kafe di kota Tripoli, Lebanon Utara, yang menewaskan 9 orang dan melukai 37 lainnya. Dalam sebuah pernyataan, Al Nusra Front menyampaikan bahwa serangan tersebut merupakan "balas dendam terhadap kelompok Sunni di Suriah dan Lebanon". Terkait dengan bom bunuh diri dimaksud, Kemlu telah mengeluarkan siaran pers yang pada intinya mengecam bom bunuh diri tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
13. Selain itu, pada 18 Januari 2015, Israel ~~melancarkan~~ serangan udara ke wilayah Golan dan menewaskan 6 anggota Hezbollah dan seorang Jenderal dari Revolutionary Guard Iran, Mohammad Ali Allahdadi. Dalam kaitan ini, Hezbollah melancarkan serangan balasan (28/01/15) yang menyebabkan tewasnya 2 tentara Israel.

Ekonomi

14. Sistem perekonomian negara Lebanon merupakan sistem perekonomian liberal dan terbuka. Pasar bebas dan perdagangan terbuka merupakan karakteristik dari model perekonomian Lebanon sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1943. Hal ini tentu saja terkait dengan sejarah lama Lebanon, ketika intensitas perdagangan berlangsung sejak jaman penjajahan Perancis.
15. Sejak tahun 2011, perekonomian Lebanon terpengaruh oleh situasi

- kawasan and GDP Lebanon, mengalami penurunan signifikan sampai 1,5% selama 4 tahun berturut-turut. Dalam kaitan ini, Biro Statistik Lebanon menyatakan bahwa GDP Lebanon di tahun 2014 mencapai US\$ 50 miliar dan pertumbuhan GDP tercatat 2,5%.
16. Oleh karena perekonomian Lebanon sangat tergantung kepada sektor jasa termasuk pariwisata, teknologi informasi, dan jasa perbankan, serta sektor perdagangan, yang sangat terpengaruh oleh situasi eksternal (kawasan) sehingga pada akhirnya hal ini juga mempengaruhi GDP Lebanon. Kedua sektor tersebut, jasa dan perdagangan, menyumbang sampai 60% perekonomian Lebanon dan mampu mempekerjakan sebanyak 73% tenaga kerja.
 17. Sektor pariwisata selalu menarik perhatian investor karena lokasi negara tersebut yang strategis, warisan budayanya yang kaya dan ketersediaan tenaga kerja yang dapat berbahasa asing. Namun, sektor tersebut juga terpengaruh oleh konflik di negara tetangga yang menyebabkan turunnya jumlah pendapatan dari wisatawan sampai dengan 6,7%, dari sejumlah US\$ 1,4 juta pada tahun 2012 menjadi 1,3 juta pada 2013.

VI. HUBUNGAN BILATERAL RI-LEBANON

Politik

1. Hubungan antara Indonesia dengan Lebanon bermula dengan diumumkannya pernyataan pengakuan de-jure atas negara Republik Indonesia oleh Presiden Lebanon, Bechara El-Khoury pada tanggal 29 Juli 1947. Lebanon adalah negara yang ketiga mengakui Indonesia setelah Mesir dan Suriah.
2. Hubungan diplomatik kedua negara telah dirintis sejak dasawarsa 50-an melalui Duta Besar RI di Cairo yang merangkap Lebanon, disusul pada pertengahan desawarsa itu dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk membuka perwakilannya di Beirut dengan status Kuasa Usaha, sementara Duta Besarnya tetap dirangkap dari Cairo.
3. Ketika pecah perang saudara di Lebanon (1975-1990) Perwakilan RI di Beirut ditutup pada tahun 1976 karena alasan keamanan, dan dirangkap

oleh KBRI Damaskus. Lebanon membuka perwakilannya di Jakarta pada tahun 1995 dengan menempatkan seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Sedangkan Indonesia membuka kembali perwakilannya di Beirut pada tahun 1996 dan menempatkan seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Beirut. Untuk lebih mempererat hubungan bilateral tersebut, khususnya bidang ekonomi dan perdagangan, pada tahun 1997 Indonesia mengangkat seorang Konsul Kehormatan RI di Tripoli (Tarablus), kota kedua terbesar di Lebanon.

4. Kendati kedua negara baru membuka kembali perwakilannya pada tahun 1996, namun hubungan dan kerja sama politik kedua negara selama ini terjaga dengan cukup baik. Menyangkut isu-isu internal, kedua negara mampu menunjukkan saling pengertian dengan tidak saling mencampuri urusan internal. Berbagai krisis politik di Indonesia seperti isu Aceh, konflik SARA di Ambon, HAM dan sebagainya ditanggapi cukup bijak oleh Lebanon dengan menyerahkan sepenuhnya solusinya kepada pemerintah RI.
5. Demikian pula sebaliknya, pemerintah RI sangat mendukung posisi Lebanon dalam menghadapi berbagai isu terutama dalam konfliknya dengan Israel. Penempatan pasukan perdamaian Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan adalah wujud nyata dari dukungan RI kepada Lebanon. Dalam kaitan ini, per 13 April 2015, terdapat sebanyak 1.288 pasukan Indonesia yang bergabung di UNIFIL.
6. Kunjungan yang telah difasilitasi KBRI Beirut selama tahun 2014:
 - a. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI, Laksamana Marsetio, 26 April 2014
Kasal TNI telah bertemu dengan Navy Commander Lebanon, Rear Admiral Nazih Jbaily, dimana dalam pertemuan tersebut, Laksamana Marsetio juga menawarkan program training militer yang diselenggarakan di Indonesia yang ditujukan bagi perwira-perwira yunior Angkatan Laut Lebanon. Selain pelatihan mengenai kemiliteran di laut, program training tersebut juga akan memberikan pelatihan mengenai manajemen angkatan laut dan pelajaran Bahasa Indonesia

untuk para peserta asing selama 6 bulan.

- b. Kunjungan Kerja Working Group 12 Anggota Badan Legislasi DPR, 16-19 September 2014

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mencari masukan terkait penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Selama di Lebanon, Badan Legislasi melakukan pertemuan dan diskusi dengan Parlemen Lebanon, yaitu Komisi Masalah Sosial, Kesehatan Masyarakat, dan Tenaga Kerja –selaku komisi yang membahas Undang-Undang No. 220 tahun 2000 tentang Disabilitas, yang diwakili oleh 3 orang anggota Parlemen Lebanon yaitu, Deputy Atef Majdalani selaku Ketua Komisi, Bilal Farhat, dan Yusuf Khalid selaku perwakilan anggota komisi.

Baleg juga bertemu dengan National Committee of the Disabled (NCD) yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial Lebanon yang menangani langsung penerapan UU no 220 mengenai Disabilitas, di kantor Kementerian Sosial Lebanon, Beirut.

Kerja sama Saling Dukung

7. Indonesia dan Lebanon memiliki hubungan yang cukup baik dalam hal pencalonan pada organisasi internasional (OI). Saat ini, terdapat beberapa pencalonan yang tengah berlangsung sebagai berikut:

ANGGOTA DEWAN HAM 2011-2014 (RI) /DEWAN ICAO 2010-2013 (Lebanon)

8. Pemri dan Lebanon memiliki kesepakatan saling dukung dimana Pemri mendukung pencalonan Lebanon pada Dewan ICAO 2010-2013 yang pemilihannya telah berlangsung pada tahun 2010, sedangkan Lebanon mendukung pencalonan RI pada Dewan HAM 2011-2014 yang pemilihannya telah berlangsung pada tanggal 20 Mei 2011.

EXECUTIVE BOARD (EB) UNESCO 2011-2015 (RI) / COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) 2013-2017 (Lebanon)

9. Pemri dan Lebanon memiliki kesepakatan saling dukung dimana Pemri mendukung pencalonan Lebanon pada CRC 2013-2017 yang pemilihannya berlangsung pada bulan November 2012, sedangkan

Lebanon mendukung pencalonan RI pada EB UNESCO periode 2011-2015 yang pemilihannya telah berlangsung pada tanggal 25 November 2011.

ANGGOTA INTERNATIONAL LAW COMMISSION (ILC) 2012-2016 (RI) / COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) 2013-2016 (Lebanon)

10. Pemri dan Lebanon memiliki kesepakatan saling dukung dimana Pemri mendukung pencalonan Lebanon pada CEDAW 2011-2015 yang pemilihannya berlangsung pada tahun 2012, sedangkan Lebanon mendukung pencalonan kembali Dubes Nugroho Wisnumurti sbg anggota ILC periode 2012-2016 yang pemilihannya telah berlangsung pada tanggal 17 November 2011.

Ekonomi

11. Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi kedua negara, KBRI Beirut mengidentifikasi salah-satu isu yang cukup krusial, yakni diperlukannya sebuah MoU untuk mengatur pelaksanaan kebijakan fiskal, khususnya mengenai pajak berganda pada kegiatan ekspor-impor yang dilaksanakan ~~di antara kedua negara~~
12. Total nilai perdagangan RI-Lebanon selama periode 2010-2014 turun rata-rata 6,77% per tahun. Pada tahun 2014, nilai perdagangan bilateral tercatat sebesar USD 77,89 juta, naik 1,28% dibanding tahun 2013. Nilai ekspor RI pada 2014 turun menjadi USD 74,16 juta, turun sebesar 2,24% dari tahun 2013. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Lebanon mengalami kenaikan sebesar 255,51% pada 2014 dari tahun sebelumnya, sehingga dari nilai USD 1,04 juta pada 2013 menjadi USD 3,72 juta pada 2014.

NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan LEBANON
Periode: 2010 - 2015

(Nilai : Ribu US\$)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Trend (%) 2010- 2014	Jan - Apr		Perub. (%) 2015/ 2014
							2014	2015	
PERDAGANGAN	115.958,2	69.980,6	78.471,9	76.910,8	77.895,2	-6,77	25.638,6	32.538,6	26,91
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	22,4	0,00
NON MIGAS	115.958,2	69.980,6	78.471,9	76.910,8	77.895,2	-6,77	25.638,6	32.516,2	26,83
EKSPOR	58.362,9	64.158,8	75.744,2	75.861,8	74.166,1	6,68	25.082,9	30.255,2	20,62
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	22,4	0,00
NON MIGAS	58.362,9	64.158,8	75.744,2	75.861,8	74.166,1	6,68	25.082,9	30.232,8	20,53
IMPOR	57.595,2	5.821,7	2.727,7	1.049,0	3.729,2	-51,27	555,6	2.283,4	310,94
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
NON MIGAS	57.595,2	5.821,7	2.727,7	1.049,0	3.729,2	-51,27	555,6	2.283,4	310,94
NERACA PERDAGANGAN	767,7	58.337,1	73.016,4	74.812,8	70.436,9	153,12	24.527,3	27.971,8	14,04
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	22,4	0,00
NON MIGAS	767,7	58.337,1	73.016,4	74.812,8	70.436,9	153,12	24.527,3	27.949,4	13,95

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

13. Dalam catatan BKPM, terdapat catatan bahwa pada 2013, terdapat 2 proyek investasi Lebanon di Indonesia dengan nilai USD 200.000, dan pada 2014 tercatat 7 proyek Lebanon di Indonesia dengan nilai USD 800.000.

Sosial Budaya

14. Pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2011 Kemlu c.q. Direktorat Diplomasi Publik bekerjasama dengan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) telah melaksanakan Interfaith Dialogue RI-Lebanon yang bertempat di Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur. Sebagaimana yang disepakati kedua negara, bahwa penyelenggaraan Interfaith Dialogue RI-Lebanon selanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan di Lebanon, namun sampai saat ini belum terlaksana.
15. Diantara bentuk implementasi kedekatan kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip toleransi, kepedulian sosial, kemanusiaan dan kesamaan

akar sosial-budaya tersebut di atas nampak jelas dari simpati yang begitu besar dari masyarakat Lebanon kepada Indonesia menyusul bencana gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan malam charity yang digelar oleh KBRI Beirut pada tanggal 20 Oktober 2009 lalu, telah terkumpul dana sejumlah US\$ 12.000,-, ditambah komitmen bantuan dari Hariri Foundation sebesar US\$ 20.000,-.

16. Terkait dengan adanya konflik di Suriah, banyak WNI yang direpatriasi dari Suriah melalui Lebanon. Pemerintah Lebanon juga memberikan perhatian dan kemudahan atas proses repatriasi dimaksud, dengan antara lain mulai akhir Desember 2012, Pemerintah Lebanon memberikan entry visa selama 30 (tiga puluh) hari secara cuma-cuma kepada WNI/TKI yang direpatriasi dari Suriah.
17. Jumlah masyarakat Indonesia (WNI) di Lebanon hingga awal bulan Oktober 2014 berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya adalah WNI yang bekerja secara profesional di Lebanon, beserta keluarganya. Hanya 20 (dua puluh) orang merupakan WNI pekerja non-profesional yang sudah bekerja di Lebanon sejak sebelum tahun 2010. Dapat diinformasikan bahwa pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia dan Lebanon menyepakati sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang memungkinkan hanya WNI pekerja profesional saja yang dapat bekerja di Lebanon. Sedangkan untuk WNI pekerja non-profesional tidak dapat bekerja di Lebanon. Sehingga WNI pekerja non-profesional yang tinggal secara resmi di Lebanon adalah mereka yang telah bekerja sejak sebelum tahun 2010.

VII. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN LEBANON

Kekuasaan eksekutif negara dijalankan oleh Presiden dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sesuai konstitusi, Presiden merupakan Kepala Negara, Panglima angkatan bersenjata dan kepala dewan tinggi pertahanan nasional, Presiden dipilih oleh Parlemen untuk periode enam tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, seorang mantan Presiden harus menunggu satu periode (6 tahun) untuk dapat dipilih kembali, sesuai kesepakatan nasional, seorang Presiden adalah seorang Kristen Maronite.

Presiden mensahkan UU setelah disetujui oleh Parlemen, namun setelah diundangkan Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengubah UU tersebut. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menegoisasi dan meratifikasi sebuah perjanjian internasional setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Perdana Menteri. ~~Perdana Menteri memiliki kewenangan memberikan grasi, namun pemberiannya harus dengan persetujuan Parlemen.~~

Perdana Menteri diangkat oleh Presiden setelah Dewan Menteri atau cabinet dibentuk oleh Perdana Menteri dengan masukan dan hasil konsultasi dengan Presiden. Perdana Menteri merupakan wakil presiden dalam Dewan Tinggi Pertahanan nasional. Sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri bertugas menyusun agenda sidang rapat atau Dewan Menteri yang bertujuan mengoordinasikan kerja seluruh kementerian. Sesuai kesepakatan nasional, Perdana Menteri berasal dari kelompok Sunni

Lebanon adalah sebuah republik demokratis parlementer, yang memberlakukan sebuah sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme. Sistem ini, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa konflik sektarian akan dapat dihindari, berupaya untuk secara adil mewakili distribusi demografis aliran-aliran keagamaan dalam pemerintahan. Karena itu, jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan disediakan untuk anggota-anggota kelompok-kelompok keagamaan tertentu.

Misalnya, Presiden Lebanon, haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Wakil Perdana Menteri seorang Kristen Ortodoks, dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syi'ah. Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1943 antara Presiden (Maronit) dan Perdana Menteri waktu itu (Sunni) dan baru diformalkan dengan konstitusi pada tahun 1990.

Kecenderungan ini berlanjut dalam distribusi ke-128 kursi parlemen yang dibagi dua antara Muslim dan Kristen. Sebelum 1990, rasinya adalah 6:5, yang menguntungkan orang Kristen. Namun, Persetujuan Taif, yang mengakhiri perang saudara 1975-1990, menyesuaikan rasio itu untuk memberikan representasi yang sama bagi para pemeluk dari kedua agama tersebut.

Menurut konstitusi, pemilihan langsung harus dilakukan untuk parlemen setiap empat tahun sekali, meskipun dalam sejarah Lebanon belakangan ini, perang saudara selalu meletus sebelum hak ini dilaksanakan.

Parlemen memilih Presiden untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak boleh dipilih berturut-turut. Walaupun begitu, peraturan ini pernah dilanggar dua kali dengan masa perpanjangan jabatan selama 3 tahun pada masa pemerintahan Elias Hrawi (1990-1995 diperpanjang hingga 1998) dan Emile Lahoud (1998-2004 diperpanjang hingga 2007). Sistem yudisial Lebanon mengikuti Kode Napoleon. Tidak ada Juri dalam pengadilan. Gedung parlemen Lebanon terletak di Place de l'Étoile, Jumlah anggota Parlemen Lebanon sebanyak 128 orang juga diatur jumlahnya berdasar agama yang dianut yaitu :

Kristen/Katolik	64 orang anggota Parlemen
Maronit	34
Ortodoks Yunani	14
Katolik Yunani	8
Ortodoks Armenia	5
Katolik Armenia	1

Kristen/Katolik	64 orang anggota Parlemen
Maronit	34
Ortodoks Yunani	14
Katolik Yunani	8
Ortodoks Armenia	5
Katolik Armenia	1

Menurut konstitusi, pemilihan langsung harus dilakukan untuk parlemen setiap empat tahun sekali, meskipun dalam sejarah Lebanon belakangan ini, perang saudara selalu meletus sebelum hak ini dilaksanakan.

Parlemen memilih Presiden untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak boleh dipilih berturut-turut. Walaupun begitu, peraturan ini pernah dilanggar dua kali dengan masa perpanjangan jabatan selama 3 tahun pada masa pemerintahan

Elias Hrawi (1990-1995 diperpanjang hingga 1998) dan Emile Lahoud (1998-2004 diperpanjang hingga 2007). Sistem yudisial Lebanon mengikuti Kode Napoleon. Tidak ada Juri dalam pengadilan.

A. Program Kegiatan

- *Pertemuan dengan Dubes RI di Lebanon beserta jajarannya***

Diskusi untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai hubungan bilateral Indonesia- Lebanon serta isu-isu dalam negeri Lebanon khususnya yang memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi legislatif.

- *Pertemuan dengan Menteri Pariwisata Lebanon***

Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepariwisataan Lebanon guna menjadi bahan pertimbangan arah kebijakan kepariwisataan Indonesia serta sebagai upaya membangun kerjasama dalam bidang pariwisata antara Lebanon dan Indonesia.

- *Pertemuan dengan Ketua Parlemen Lebanon H.E Nabih Berri***

Diskusi ini dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama bilateral khususnya kerjasama antar Parlemen kedua negara dan GKSBN Parlemen Lebanon mengharapkan ketua Parlemen dapat berkunjung ke Indonesia guna semakin mempererat hubungan kedua negara.

- *Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Lebanon***

Diskusi dan dialog ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas sesama WNI di Lebanon, dan juga dalam rangka menyampaikan situasi dan kondisi terakhir mengenai Indonesia. Selain juga mendengarkan saran dan masukan untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia.

- *Pertemuan dengan Komite Luar negeri Parlemen Lebanon***

GKSBN DPR RI-Parlemen Lebanon ingin mendapatkan masukan terkait isu-isu politik dan keamanan regional. Selain itu diharapkan diskusi ini juga dapat meningkatkan kerjasama antar parlemen yang lebih erat lagi.

- *Pertemuan dengan Lebanon- Indonesia Parliamentary Friendship Group***

GKSB DPR RI – Parlemen Lebanon ingin mengetahui lebih banyak mengenai mekanisme kerja di bidang legislasi, pengawasan, serta penganggaran.

VIII. Hasil-hasil Kunjungan

Dalam kunjungan bilateral Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Lebanon tersebut, Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR-RI – Parlemen Lebanon telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Lebanon, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, Ketua Parlemen Lebanon, KRI Bung Tomo-357 di Pelabuhan Beirut, Masyarakat Indonesia di Lebanon, Komite Luar Negeri Parlemen Lebanon, Group Persahabatan Parlemen Lebanon-Indonesia :

1. Pertemuan dengan Menteri Pariwisata Lebanon Michel Pharaon pada tanggal Jum'at 11 Desember 2015, Pukul 10.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Delegasi GKSB Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz Mengatakan, bahwa bahwa kunjungan Group Kerjasama Bilateral Parlemen Lebanon ke Lebanon dalam rangka memperkuat kerjasama parlemen Indonesia-Lebanon.

Pada kesempatan itu, Ketua Delegasi memperkenalkan seluruh anggota delegasi GKSB Parlemen Lebanon yaitu :

1. Ono Surono, ST /Anggota GKSB Parlemen Lebanon/F.PDIP
2. Drs. Popong Otje Djunjunan /Anggota GKSB Parlemen Lebanon/F. PG
3. H. Iwan Kurniawan, SH /Anggota GKSB Parlemen Lebanon/ F.P.GERINDRA
4. H.Sungkono /Anggota GKSB Parlemen Lebanon/F.PAN
5. Sugeng Irianto, S.Sos, MA /Sekretariat Delegasi
6. Maria Dumaris Simanjuntak /Sekretariat Delegasi
7. Wardatun Naim /Istri Irgan Chairul Mahfiz

Menurut Ketua Delegasi GKSB Parlemen Lebanon, rencana kunjungan ke Lebanon sudah direncanakan sejak lama dan kami sangat menghormati Lebanon sebagai negara yang strategis serta merupakan

negara ketiga yang mengakui kedaulatan NKRI di era Presiden Bechara El Khoury, yaitu ketika dua tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Artinya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintah Lebanon sangat cepat sekali. Hal itu menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Lebanon dan Indonesia.

Kunjungan GKS Parlemen Lebanon ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Lebanon, hubungan itu tidak hanya antara pemerintah ke pemerintah, masyarakat ke masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara parlemen dengan parlemen. DPR Periode ini baru pertama kali mengunjungi negara Lebanon, karena kami menganggap Menteri pariwisata Lebanon merupakan kementerian yang berhasil mendatangkan turis di Beirut, Lebanon. Tentu saja DPR RI ingin lebih banyak belajar dari potensi pariwisata di Lebanon.

Seperi diketahui, kedatangan turis ke Indonesia masih belum maksimal angka kunjungannya ke Indonesia. Baru sekitar 9 juta turis mengunjungi Indonesia dari yang ditargetkan sebesar 20 juta wisatawan yang kita inginkan. Oleh karena itu, Indonesia sangat agresif membebaskan visa antar berbagai negara dan membangun infrastruktur di lokasi pariwisata yang cukup luas. Konsentrasi Indonesia sekarang ini adalah membangun wisata bawah karena panjang pantai dan pariwisata laut itu cukup luas 5.8 juta dengan 12 ribu pulau-pulau.

Dalam sesi tanya jawab, Anggota delegasi berpartisipasi aktif dan menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain :

- **Dra. Popong Otje Djunjunan/Anggota GKS Parlemen Lebanon :**
 - Dia menanyakan mengenai perkembangan industry pariwisata di Lebanon saat ini, dan kontribusi industry pariwisata dalam Pendapatan Negara Lebanon ?
 - Pada kesempatan itu, Ibu Popong menyatakan bahwa industri pariwisata di Lebanon bahan bakunya merupakan cagar budaya yang berlimpah, kita ingin tahu lebih jauh karena memang ada persamaan dengan Indonesia, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana memanage cagar budaya karena Lebanon lebih bagus dibandingkan Indonesia?

- Bagaimana Garis komando koordinasi Kementerian Pariwisata dengan lembaga dibawahnya, karena di Indonesia itu otonomi daerah membawa dampak positif dan negative bagi Indonesia, dimana policy Kementerian kerap tidak sinkron dengan pejabat daerah seperti Bupati dan Walikota di Indonesia?
- **H. Sungkono/Anggota GKS B Parlemen Lebanon**
 - Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara industri yang cukup bersaing di negara Asia, kita ingin menanyakan apakah ada produk Indonesia yang bias dibawa ke Lebanon, karena saya berharap ada pengembangan misi perdagangan misi Lebanon dengan Indonesia?
 - Saya melihat potensi Agro Indonesia juga bisa masuk Eropa melalui Lebanon, selain itu saya pikir persoalan prospek bisnis tidak kalah menarik khususnya di bidang furniture, karena saya melihat Lebanon tidak menghasilkan furniture, dan kita mengharapkan jika produk Indonesia bisa dikirim ke Lebanon maka kita mengharapkan produk Indonesia dapat bersaing dengan produk dari Cina.

Dalam sambutan balasannya dan menanggapi pertanyaan dari beberapa orang Delegasi GKS B Parlemen Lebanon,

Menteri Pariwisata Lebanon Michel Pharaon :

Negara Lebanon memang memiliki kondisi geografis yang strategis di Asia dan Eropa, karena posisinya yang strategis Negara Lebanon sangat terbuka atas kebudayaan luar arab, eropa dan Tunisia yang berumur kurang lebih 5000 tahun lalu. Karena keadaan negara yang tidak stabil banyak para turis yang enggan mengunjungi Lebanon saat ini. Lebanon itu memiliki situs pariwisata pada setiap kota tetapi jika kita ke Beirut sejak tahun 1960an memang sudah terkenal dimana-mana kita bisa melihat dan menemukan sisa-sisa kebudayaan Persia, Arab, Romawi, Bizantium dan kerajaan islam lainnya.

Pendapatan di industri pariwisata 10 persen dari pendapatan negara, karena memang keadaan negara yang tidak stabil jadi

para turis enggan mengunjungi Lebanon. Lebanon kedepan sangat berpotensi pada sector kebudayaan karena kawasan Suriah sedang mengalami keguncangan untuk itu Lebanon diharapkan dapat tampil sebagai pengganti, karena kaya raya kebudayaan di Lebanon.

Menurutnya, bukan hanya situs budaya yang menjadi peran penting bagi industri turisme di suatu negara, ada faktor lain seperti cuaca, lingkungan dan keberadaan agama di tempat tersebut. Kami menemukan terdapat 1200 situs agama Islam dan Kristen. Selain itu kondisi cuaca di Lebanon sangat bagus dan bersih disatu tempat kita berada di gunung dan akhir tahun turun salju pada satu tempat.

Restoran dan makanan juga perlu diperhatikan karena hal itu dapat mendukung industri pariwisata di suatu negara. Dalam manajemen cagar budaya kami bekerjasama dengan kementerian kebudayaan dan memberikan tanggung jawab kepada masing-masing situs dengan perusahaan swasta dibawah kordinasi menteri pariwisata seperti daerah Pariwisata Jetta grotto kami telah menyerahkan kepada swasta untuk merawatnya. Salah satu prestasi lebanoan itu terdapat 60 menu makanan yang terdaftar di UNESCO

Jadi ada beberapa point yang bisa kita pelajari pertama yaitu kita sangat menghormati kebudayaan dan pengaturan cagar wisata setempat, setiap wilayah sudah ada pengaturan soal itu, kita hanya memfasilitasinya. Tidak kalah pentingnya untuk bekerjasama dengan Kepolisian dan pemegang keamanan wilayah setempat dari situ kita bisa masuk dan mengelola cagar budaya, bisa juga dibentuk semacam kepolisian yang bertugas menjaga pariwisata.

Ada beberapa permasalahan di desa terpencil kita bekerjasama dengan keamanan setempat atau dengan NGO, dan lembaga lain yang memiliki peran ditempat tersebut. Sekarang ini sedang ada proyek di Lebanon kami sedang memblok wilayah Lebanon setiap blok akan memiliki kantor perwakilan resmi yang nanti akan

bertanggung jawab terkait potensi pariwisata daerah tersebut. Ini merupakan proyek lima tahun kedepan, sekarang masyarakat Lebanon di luar kota banyak pindah ke kota untuk itu kami bangun potensi daerah tersebut agar mereka tidak melakukan urbanisasi ke perkotaan.

Perlu digaris bawahi, yang paling semangat adalah pihak swasta pebisnis yang sudah melakukan perdagangan dengan Indonesia, kalau berkenan kita akan membuat pertemuan dengan Kamar Dagang Lebanon, dan pertemuan dengan pebisnis di Lebanon, kalau memang serius akan saya kumpulkan dengan kamar dagang dan Pebisnis. Perlu di ketahui kami punya partner baik itu swasta dan perwakilan kamar dagang di Lebanon harus serius dan direncanakan dengan matang dan diketahui apa yang kita bicarakan.

Ketua Delegasi GKSB Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz:

DPR RI menyambut dengan pintu terbuka apabila ada industri yang ingin kerjasama dengan Indonesia. Kami menyambut dan mengundang Menteri Pariwisata untuk berkunjung ke Indonesia, karena saat ini di Indonesia sedang ada tahun Pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia). Dirinya menilai warga Lebanon kadang hanya berhenti di Malaysia yang hanya satu jam dari Indonesia bahkan hanya transit di Indonesia untuk ke Australia, selain itu, sangat sedikit makanan dan restoran yang bercirikan Lebanon lebih banyak makanan dan restoran Saudi di Indonesia.

Kita mengharapkan dengan kehadiran Menteri Pariwisata dapat menarik restoran Lebanon dan para turis ke Indonesia. Kami ingin merasakan 60 jenis makanan Lebanon yang sudah diakui oleh UNESCO. Kita sangat menghargai apabila ada undangan untuk ikut dalam pariwisata di Timur Tengah khususnya Lebanon

Gb. 1 Pertemuan Delegasi GKS
Parlemen Lebanon-Menteri Pariwisata Michel Pharaon





2. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Lebanon H.E Nabih Berri hari Jum'at 11 Desember 2015, Pukul 12.30-13.30

**Sambutan Ketua Delegasi GKS Parlemen Lebanon
Irgan Chairul Mahfiz**

Ketua Delegasi GKS Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz menutupkan terima kasih telah diterim~~akan~~ oleh

Negara Lebanon di mata Indonesia merupakan negara yang sangat familiar dan erat. Pasalnya, Lebanon sangat dekat dengan Indonesia karena negara ketiga di dunia yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kami sangat mengapresiasi Lebanon sebagai negara yang bersahabat di Indonesia. Selain itu, banyak kesamaan pandangan antara Lebanon dengan Indonesia dimana keduanya sangat aktif di Konferensi Asia Afrika dan kami menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadirannya di Bandung.

Menanggapi sambutan Ketua Delegasi Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz berikut tanggapan dan jawaban sambutan dari Ketua Parlemen H.E Nabih Beri,

Ketua Parlemen Lebanon H.E Nabih Beri :

Dia mengucapkan selamat datang kepada seluruh Delegasi Parlemen Indonesia. dirinya mengatakan, hubungan Lebanon dan Indonesia dalam kondisi yang sangat baik sesuai yang diharapkan, memang di Parlemen kami juga memiliki Group Kerjasam Bilateral Lebanon-Indonesia.

Menurutnya, pembentukan Group Persahabatan Bilateral Lebanon-Indonesia sangat baik khususnya dalam meningkatkan kerjasama pada level parlemen di Asia ataupun Internasional. Pasalnya, Lebanon sangat intens berkordinasi dengan Presiden maupun Parlemen di Indonesia. Perlu kami garis bawahi peran Indonesia di UNIFIL sangat besar. Jadi memang sejak awal Indonesia sudah memberikan sumbangsihnya dalam menjaga perdamaian dari dulu hingga sekarang. Sebenarnya problem di Lebanon bukan hanya dari Lebanon sendiri tetapi hal itu juga berasal dari persoalan atau konflik Internal tetangga kanan kirinya.

Diakuinya saat ini kondisi di kawasan Timur Tengah sedang dalam keadaan bahaya. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah merupakan kepentingan Israel, mereka bukan hanya ingin memecah belah negara Arab, tetapi lebih jauh ingin menceraiberaikan Islam. Belakangan ini apa yang kita dengar adanya gerakan organisasi yang keras bukan termasuk

Selain itu, mereka juga membunuh orang Kristen dan ahli kitab. Identitas mereka telah mencoreng nama Islam, dan juga mau tidak mau gerakan tersebut menjadi penyebab gerakan terorisme dari kelompok Kristen. Inilah yang terjadi kita perhatikan bersama apa yang terjadi di Perancis, dan Amerika Serikat.

Sebagai seorang Muslim, saya tidak setuju mendengar statement dari Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump dan situasi Pemilukada di Perancis, karena itu saya mencoba untuk mencegah Islam dari paham-paham semacam itu (radikal). Pada kesempatan itu, Dia mengatakan, kita semua harus mengembalikan pada diri masing-masing bagaimana memandangnya apakah kita memandang hal biasa atau jika tidak maka perang salib dapat terulang kembali. Pertama, kita harus memberikan pendidikan dan perubahan yang berasal dari diri masing-masing.

Pada pernyataan kali ini, saya sampaikan sebagai negara muslim terbesar di dunia, dan Lebanon negara yang penuh keragaman. kenapa saya garis bawahi disini, bahwa Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia namun tidak ada persoalan terorisme atau kekerasan di Indonesia namun Indonesia perlu mewaspadai persoalan-persoalan tersebut.

Salah satu tujuan kami sekarang adalah bagaimana menjadikan negara Lebanon sebagai masyarakat muslim yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi dunia. Kami mempunyai kewarganegaraan Lebanon di 19 parlemen negara-negara di dunia sehingga Lebanon dapat menjadi teladan, bahkan sampai Afrika, kecuali Nigeria yang tidak bisa jadi teladan. Jadi terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sampaikan salah saya untuk Ketua DPR RI mudah-mudahan jika berkenan dapat hadir ke Lebanon.

Pada sesi tanya jawab dengan Ketua Parlemen Lebanon anggota GKSB melempar pertanyaan kepada Ketua Parlemen Lebanon H.E Nabih Beri :

Popong Djunjunan/Anggota GKSB Parlemen Lebanon/F.PG

Dia menanyakan berapa mayoritas usia anggota Parlemen Lebanon? Kemudian latar belakang apa saja dari anggota Parlemen dan pekerjaan

mereka? Berikutnya, Dia menanyakan bagaimana pembahasan anggaran di Lebanon apakah sampai dengan rincian kegiatan (satuan tiga) seperti halnya di Indonesia.

“Saya tidak tahu tentang detail dalam anggaran ini”

dijaga keseimbangannya, sekali lagi ini hal menarik bagi anggota dewan untuk mendalami hal seperti ini, dalam kerangka menjaga keseimbangan ini kita juga tahu system politik pemerintahannya dibagi dengan sebagian rupa system parlementer tetapi agak unik pembagian kekuasaannya, Presiden dari Kristen Maronit, PM islam sunni, Parlemennya dari Syiah, ini tidak menjamin keseimbangan yang baik meskipun sudah ditentukan Kristen Maronit tapi sampai 17 bulan Presiden masih belum terpilih.

Menurutnya, Demokrasi Indonesia jauh lebih baik karena dapat menjaga keseimbangan dan pengisian lembaga tinggi negara bisa berjalan lancar dan system politik. Lebanon ini luasnya Cuma 10.442 km2 ibaratnya Jawa Barat dibagi dua horizontal, sebelah enam provinsi, sebelah utara dan timur itu Suriah yang sedang bergejolak, barat itu laut mediterian, selatan itu Israel. Lebanon sedang dikepung dengan negara yang bergejolak, jika tidak kuat dan bersatu dan menjaga keseimbangan politiknya gampang saja untuk dihancurkan karena dipepet dengan kedua negara.

Saat ini terdapat UNIFIL terdapat 1296 Personel di Selatan pas perbatasan dengan Israel, dan juga ada angkatan Lautnya, KRI Bung Tomo, dimana nanti kita bisa melihat bagaimana kehebatan dan kecanggihan kapal yang kita miliki. Pertumbuhan ekonomi di Lebanon kurang baik dan menarik karena situasi politik yang belum stabil menurut catatan ekonomi dunia 2009 sempat naik memiliki pertumbuhan 9 persen bahkan dikatakan tertinggi di kawasan timur tengah, dengan pergolakan politik merosot akhir 2015 hanya satu persen. Jadi luar biasa jauh sekali. Ekonomi yang sulit ini mengakibatkan biaya hidup di Lebanon juga sangat berat selanjutnya karena ekonomi yang berat ini kami KBRI mencoba hubungan diplomatic tidak hanya pintu ekonomi, tetapi juga melalui budaya pendidikan dan agama yang dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Lebanon.

Lebanon sangat berharap Indonesia dapat tampil menjaga kebersamaannya, ukhuwahnya, bahasa kerennya bagaimana dapat menjadi lokomotif perdamaian dunia, seperti kita ketahui Timur tengah ini sudah lelah dengan konflik berkepanjangan yang dimulai dari Arab

Spring pada bulan Desember. Yang pada hakekatnya demokratisasi di Timur Tengah namun sampai sekarang negara yang terkena arab spring masih belum bangkit yang tersisa di Suriah yang sampai sekarang menjadi persoalan yang mendunia. Di Suriah ada beberapa hal yang menarik dengan terjadinya suatu pergolakan yang dahsyat terjadinya perubahan komposisi masyarakat di Timur Tengah dimana terjadinya mobilisasi demografis. Masuknya orang luar ke Suriah, dan masyarakat Suriah masuk ke Lebanon 1 juta, dan Yordan 1 juta, sedangkan orang yang masuk ke Suriah kita tidak tahu siapa saja. Negara bangsa di Suriah kita tidak tahu.

Saat ini ISIS menawarkan negara Kilafah yang belum tentu juga lebih baik. Kehadiran GKS Parlemen Lebanon ini merupakan pilihan yang tepat untuk kita sebagai bangsa Indonesia dan dunia. Kita dapat peroleh satu hal yang positif untuk saling memperkuat demokrasi Indonesia memiliki demokrasi, dan Lebanon dengan demokrasi Konvensionalisme, pembagian kekuasaan tetapi juga untuk memperkuat parlemen sebagai pilarnya demokrasi.

Dengan GKS ini, lanjutnya, kita dapat menjual demokrasi Indonesia ke negara Timur tengah karena demokrasi yang kita bangun dapat menselaraskan antara Islam dan demokrasi. Artinya Islam bisa berdemokrasi kenapa di Timur Tengah tidak bisa. Ini merupakan tugas yang berat dan strategis bagi kita semua khususnya bagi GKS Parlemen Lebanon, jika bisa berhasil ini bisa menjadi catatan sejarah GKS Lebanon, memperkenalkan dan mentrasformasikan demokrasi. Kalau Amerika bisa mentrasformasikan demokrasi yang hasilnya belum tentu baik, dan dengan arab spring juga berantakan, kita bisa menawarkan opsi demokrasi Indonesia.

Kedepan hubungan GKS ini bisa menjadi sarana dan kapasitas building demokrasi DPR RI dengan parlemen di Lebanon, kemampuan dan pengalaman kita sebagai anggota DPR bisa kita share di Parlemen Lebanon. Kita memberikan support terhadap Indonesia, dan parlemen Lebanon juga bisa mensuport pemerintah sehingga dapat mendorong potensi kerjasama di pariwisata, dan potensi lainnya yang belum tersentuh.

Jangan lihat penduduknya yang 4.5 juta, tetapi ini merupakan salah satu pintu masuk ke Eropa dan Timur Tengah. Kita sudah menjalin hubungan kerjasama di sector ekonomi kita perkenalkan ke Jawa Barat, dengan kopi dan tehnya kita harapkan bisa dibawa ke Lebanon. Kita bawa ulama dan mufti ke Lebanon dan mengetahui islam Indonesia yang moderat dan bisa ditransferkan ke Timur Tengah.

Ketua Delegasi GKS Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz

Sesungguhnya GKS ini berada di bawah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) yang meliputi hamper 49 negara GKS. Dimana ada parlemen kerjasama dengan negara tertentu, terbentuk medio September lalu. Saya pilihnya karena memang Pak Dubes disini. Awalnya ada 10-11 orang anggota.

Menurut Ketua Delegasi, Kondisi politik tanah air memang sedang dalam keadaan hangat, tapi hanya di level elit saja, masyarakat apakah tidak mau tahu atau sudah imun (kebal) persoalan dinamika di elit ini, yang paling menonjol rekaman Ketua DPR RI yang mengatasnamakan Presiden meminta saham PT. Freeport itu dinamika yang berlangsung sampai hari ini dan suasannya masih ribut. Saya lihat dinamika yang berkembang masih tajam, masyarakat melihat bahwa yang mereka butuhkan itu pekerjaan serta bisa mengakses pendidikan ketika keadaan kurang sehat bisa berobat. Mau apa saja silahkan saja para elit politik artinya memang demokrasi seolah-olah tidak ada persoalan, karena memang ranah politik tidak berimbang didalam sendi kebangsaan\ yang perlu dikhawatirkan jika semakin ekskalatif kita harus hati-hati nanti orang luar yang ikut campur

Dia mengatakan, saat ini Indonesia baru saja melaksanakan Pilkada serentak, kurang lebih sekitar 200 wilayah melakukan Pilkada, hanya 5 yang ditunda misal digugurnya calon gubernur yang kemudian dimenangkan oleh MA, jadi lembar kertas yang tidak siap jadi butuh waktu. Secara umum persoalan Pilkada tidak ada persoalan begitu tajam artinya konflik berat tidak ada. Ribut sengketa itu tidak ada, berujung pertengkarant antar calon ramai itu tidak ada seperti Pilkada sebelumnya.

Landai-landai saja biasa saja.

Menurutnya, Pilkada kali ini mengandung makna win take all, berapa persenpun akan menjadi pemenang, bahkan tidak sampai 30 persen bisa menang, dulu panjang bisa putaran kedua jika dianggap bermasalah bisa digugat di MK. Sekarang persoalannya tingkat partisipasi yang rendah. di Medan hanya 20 persen yang datang ke TPS, KPU sudah mengeluarkan miliaran, begitu juga calonnya, apakah KPU kurang kerjaan atau calon tidak menarik atau masyarakat sudah apatis terhadap politik. Ramai risau tidak ramai juga. Khusus di Medan karena walikota pertama 3 bulan ditangkap, walikota kedua setahun ditangkap, milih Gubernur berikutnya ditangkap jadi yah sudah terserah saja. Apalagi sekarang rombongan Bupati, Walikota, Gubernur dan anggota DPR masuk KPK.

Persoalan ini membuat masyarakat tidak perduli terhadap politik yang penting pemerintah berjalan bisa menghidupi rakyatnya, dan pengangguran dapat berkurang. Walaupun sesungguhnya pertumbuhan ekonomi menurun 4.7 persen tidak sesuai dengan yang diharapkan semakin membuat tingkat pengangguran bertambah. Terdapat 3 juta orang yang belum mendapatkan kesempatan kerja dimana peluang kerja 1.2 juta tiap tahun ada 6 juta orang yang belum memiliki akses memiliki kerja ini problem social jika ada tawaran diluar mereka keluar negeri.

Dia menambahkan, Diaspora di luar negeri itu ada 6 juta orang umumnya tenaga kerja itu perempuan dan bekerja di sector informal tanpa perlindungan yang baik ini yang belum bisa diselesaikan dengan baik kedepan kita bisa membenahi sector ini. Saat ini di Arab Saudi gaji pekerja kita masih 1000 real yang kita harapkan bisa meningkat 1750 real atau bahkan dapat mencapai 2500 real, sekarang kita sudah moratorium untuk menunda TKI kita bila tidak ada perlindungan dan salary yang baik bagi mereka kita tidak akan kirim TKI. Ini kondisi politik kita dan ekonomi kita yang masih belum terprogres dengan baik pemerintah kita punya komitmen untuk membenahi infrastruktur pendidikan kesehatan walaupun dengan dana yang masih belum memadai.

Target APBN kita sekitar Rp. 2000 triliun sedangkan pada tahun 2015 itu masih kekurangan sekitar 750 triliun jadi perlu direvisi lagi skala prioritas

yang kita inginkan jadi kementerian itu dikurangin anggarannya, jadi tidak heran dirjen pajak itu merasa bertanggung jawab dan mengundurkan diri karena tidak mampu menambah pendapatan negara, dipaksakan sampai Desember ini hanya 6 persen dari target. Mudah-mudahan dapat memacu pendapatan kita upaya untuk itu sudah dilakukan di DPR RI sekarang sedang di paripurnakan tax amnesty jadi utang tertunggak yang banyak itu bisa daftar saja.

Persoalan social menjadi problem kita yaitu maraknya narkoba sabu-sabu ditengah masyarakat bahkan sampai pada ruang pribadi. Ini meruntuhkan sendi-sendi keluarga karena Indonesia menjadi pasar produsen luar dan memasukkan produknya ke Indonesia karena pasarnya besar 200 juta orang. Dampak yang terjadi yaitu kriminal meningkat pergaulan bebas sekarang ini orang yang sakit jiwa sudah makin banyak bahkan korbannya banyak tidak hanya anak muda, akademisi, professor, doctor namanya artis sudah biasa ini tokoh-tokoh semua kena.

Ini satu hal merupakan tugas ulama dalam menjaga moral anak bangsa, supaya jangan rusak dan gesekan pemahaman juga semakin tajam juga. Saat ini semakin heterogen di Indonesia juga semakin berkembang, hal itu yang harus kita jaga karena orang semakin berani mengatakan sah tidak benar atau bid'ah ini tugas kita tidak ingin bangsa yang besar ini porak-poranda akibat tidak saling hormat-menghormati, potensi kita terkoyak ini besar sekali karena heterogen, suku bangsa, etnis, budaya, agama kalau tidak kita kawal betul maka dapat terjadi seperti kondisi di Timur Tengah.

GAMBAR II

GKS Parlemen Lebanon dengan Ketua Parlemen Lebanon H.E Nabih Beri



GAMBAR III
PERTEMUAN DENGAN KBRI LEBANON, BEIRUT



**Pertemuan GKS Lebanon dengan Masyarakat Indonesia di Lebanon,
dihadiri oleh :**

1. Delegasi GKS Lebanon
2. Dubes Indonesia untuk Lebanon Achmad Chozin Chumaedy
3. Jajaran staf KBRI Beirut, Lebanon
4. Mahasiswa-Mahasiswi Indonesia di Lebanon
5. Pekerja Profesional di Lebanon
6. WNI dan keluarganya

Acara di buka oleh Dubes Indonesia untuk Lebanon Achmad Chozin Chumaedy

Dubes Achmad Chozin Chumaedy

Dia mengatakan, di Lebanon terdapat WNI sekitar 115 orang. Yang terdiri dari mahasiswa, pekerja profesional, dan informal serta keluarga dari KBRI. Perlu kami tambahkan mahasiswa yang disini sebagian besar ada di Global University, Darul Fatwa dan qulyatul Dakwah. Para pekerja bertebaran paling banyak bekerja di spa kebanyakan dari Provinsi Bali, karena memang di Bali banyak yang di didik menjadi pekerja spa. Sementara TNI yang bertugas di PBB ada 1296 orang yang akan berakhir dan diganti dengan yang baru.

Pada kesempatan itu, Achmad Chozin Chumaedy mempersilahkan WNI untuk mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bertanya karena mereka wakil rakyat yang dulu kita semua memilihnya dalam Pemilu. Kita jangan sungkan tanyakan semua persoalan apa yang dihadapi, harapan apa dan bagaimana kita ingin mengetahui informasi dari tangan pertama sehingga kita dapat bekerja dengan tenang, kuliah juga. Situasi dan kondisi yang bagus nantinya modal kita untuk belajar.

Seperti diketahui, anggaran Kemlu sangat kecil local staf kita hidup di Lebanon sangat berat, memang diterimanya besar sekali begitu dibelanjakan kurang. Saya prihatin dan tidak berbuat banyak, bahkan local staf terpaksa memulangkan istri dan anak-anaknya karena beratnya biaya di Lebanon. Saya yakin kelihatan gaji mereka besar tetapi dibelanjakan memang tidak cukup.

Dia mengaku, sebagai duta besar bahkan menanyakan apa yang bisa dibantu bagi para mahasiswa, ini kegiatan yang ingin mereka lakukan itu dana dari mana. Satu-satunya dari KBRI, tetapi kami berat sekali. Kita kumpul-kumpul untuk meningkatkan wawasan kita banyak yang kita sudah lakukan dari KBRI, sekali lagi kami belum puas, selesai dari Kunjungan ini kami ingin melihat langkah-langkah apa yang akan dilakukan setelah kunjungan dari KBRI Beirut.

Ketua Delegasi Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz :

Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian dukungan dan kerjasama dari Bapak Dubes semua yang menjadi harapan dan target kami dapat secara optimal kami lakukan yang penting ini pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang sangat menggembirakan agar saudara-saudara kami dapat memahami tentang situasi dan kondisi negara kita, walaupun jarak yang memisahkan persoalan tanah air dapat dipahami bersama sehingga timbul rasa cinta dan nasionalisme meskipun jarak kita jauh kalau terbang lebih kurang 14 jam menuju Beirut tidak bisa langsung lewat Dubai atau Suriah, lewat Iran dan turki baru masuk ke Beirut. Hal itu tidak melepaskan semangat kita untuk tetap cinta terhadap bangsa kita.

Tak kenal maka tak sayang tak sayang tidak timbul kasih sayang, pertama saya ingin memperkenalkan satu-satu yang tergabung dalam GKSBN Parlemen Lebanon di DPR memang dibentuk dibentuk group lebih kurang 49 negara dimana negara yang bersahabat dengan baik kita bentuk group kerjasamanya. Sehingga program pemerintah dapat jalan kemudian juga suportingnya dari parlemen juga untuk kepentingan masyarakat kita di luar negeri ini. Ini merupakan penguatan agar ada perlindungan bagi warga negara kita termasuk di Beirut dimana orang lihat negara ini rawan padahal tidak.

Pertama kami sampaikan bahwa Indonesia sudah siap untuk masuk pada pasar Internasional yaitu MEA itu yang tidak bisa kita halangi, pergaulan internasional mendesak kita untuk menerima hal itu. Terbit matahari diufuk fazar pada tanggal 1 januari ada 8 profesi yang bisa dimasuki orang luar. Pertama insinyur, arsitek, surveyor, pariwisata atau

guide, perawat, dokter, dokter gigi. Bayangkan jika kita tidak hati-hati itu konsekuensinya harus siap mungkin kita tidak berpikir dipenetrasi oleh pasar luar bahkan diam-diam itu juga sudah terjadi jauh sebelum MEA. Pembangunan PLTA sudah masuk, bahkan pemain bola kita sudah cukup itu. Kalau produk tanpa orang itu semua sudah masuk. Mau tidak mau kita harus siap terhadap situasi tersebut. Dunia sudah bagaikan sebuah kampong maka tidak ada sekat lagi. Berbahagailah yang bisa bersaing di luar. Kalau dokter tidak mau ditempatkan dipulau terpencil maka dokter asing bisa masuk ke pulau jauh dari kota, insiyur, guide kalau tidak terampil dan malas akan masuk . bisa jadi orang Myanmar masuk ke Indonesia jualan kelontong, bahkan tukang cukur India bisa masuk ke Indonesia. hikmahnya harus meningkatkan kualitas kita dorong saudara kita agar bisa tampil tidak bisa diam-diam lagi. Semua sudah terbuka disisi lain harus jaga identitas bangsa kita. Harus paham berbangsa dan bernegara itu.

Melalui kuliner bahkan chef restaurant itu berasal dari luar negeri, bahkan receptionis jika kita tidak bisa maka akan diambil oleh orang filipine, pengangguran Indonesia itu 7 juta orang, peluang kerja 1.6 juta orang. Ada sekitar 6 juta tidak terserap di pasar tenaga kerja. Kita kita tidak mampu berkompetensi akan dimasukkan orang luar negeri . Di Lebanon kita senang karena banyak yang pekerja profesional artinya punya bargaining dengan pemberi kerja. Bahkan saya pernah memulangkan 2800 TKI yang berada di bandara Jeddah. Mereka pulang dengan kapal pada tahun 2011, hal ini tidak boleh terjadi ada sekitar 6 juta orang yang berada dimana-mana.

Isu ISIS begitu sensitive di Indonesia, mohon berkenan untuk tidak sekali-kali untuk ikut-ikutan, terakhir korban yaitu seorang eselon II deputi BUMN yang bekerja di Batam , istri dan anaknya berangkat ke sana. Saya mohon teman-teman Lebanon jangan terpengaruh, persoalan Syiah dan Sunni di Indonesia tidak begitu tajam seperti di Lebanon di Indonesia masih bisa karena komunitas sedikit. Kondisi terakhir aman-aman saja. Kalau politik kerjaan elit emang seperti itu, karena masyarakat memang tidak peduli karena memang system demokrasi kita seperti itu, tingkat ketidakperdulian terhadap politik itu terasa pada tanggal 9 desember itu

serentak Pilkada 210 Kabupaten, 8 propinsi serentak yang berlangsung aman tidak ada konflik yang tajam dan menun jukkan kita sudah dewasa namun tingkat partisipasi rendah orang datang ke TPS tidak sama seperti Pemilu Presiden dan legislative, 70-75 persen kalau ini dibawah 70 persen, banyak yang tidak perduli siapapun pemimpinnya, disatu sisi kita pahami independensi pemimpinnya namun kita khawatir nanti tidak ada tanggung jawab orang yang dipilih masih subyektif belum orang yang berkualitas dipilih. Terakhir persoalan kehormatan MKD masih bergulir semoga ada jalan keluar terkait etika pejabat public atau digeser ke persoalan hukum tinggal diskursusnya saja berapa kuat pengaruhnya yang tidak akan mengguncangkan sendi negara kita. Negara kita sudah luar biasa banyak SDA kita punya timah, minyak, sawit dan laut semua punya namun mengelolanya bahan baku langsung jual. Sekarang kita harapkan menjadi barang setengah jadi dan jadi yang semua diperuntukkan buat rakyat.

Presiden dan Menteri dan anggota Dewan harus berpikir untuk rakyat, semua ditekan oleh yang demo, ditekan pers. Hampir setiap hari bupati dan walikota ditangkap. Tidak bisa main-main seperti dulu, akibatnya kita memang harus serius, dan terkejutan pengelolaan anggaran baru terserap 70 persen karena takut ditangkap, PPK takut ditangkap bahkan tidak mau, Bupati dan Walikota lebih enak taruh uang di Bank karena takut itu dampak karena pressure yang tinggi terhadap penggunaan anggaran. Postur 2000 triliun dimana 20 persen untuk pendidikan kemuidian untuk kesehatan 5 persen sudah dialokasikan namun belum maksimal masih banyak puskesmas yang siap, dokter, perawat tidak mau ditempatkan di daerah terpencil, bidan belum di angkat jadi PNS, persoalan ketenagakerjaan ini menjadi problem alokasi masih sedikit belum sampai 1 persen dari APBN padahal yang mau kerja banyak ini yang masih harus diperbaiki persoalan tenaga kerja dan anggaran lainnya. Termasuk kaitan dengan anggaran Kemenlu baru 5 triliun itu tidak ada berapa persennya Dirjen Dikbud padahal yang dikelola sekian ratus kedutaan. Wajah Indonesia itu di KBRI, santun dan tertarik di Indonesia itu ada di KBRI, orang yang bisa tarik wisatawan, perdagangan itu fungsi KBRI, kalau tidak diperkuat itu yang salah.

Untung saja Lebanon itu masih surplus perdagangannya , lebih banyak eksportnya, tetapi negara lain tidak imbang. Wisatawan kita jauh dari target kita karena ada perlambatan ekonomi baru 7-9 juta baru Australia, cina dan Jepang. TImur Tengah masih lemah berhenti di Malaysia tidak menyebrang ke Indonesia, kita minta didorong agar sampai Indonesia mereka kenal Jakarta dan Bogor. Padahal ada Bali, dan Papua dengan raja ampatnya, Pulau Sabang, Makasar itu yang kita harapkan pasar Timur Tengah bisa masuk ke Indonesia. Pasca Bekerja teman-teman bisa membuka restoran Lebanon, bahkan bandung diserbu oleh Malaysia, hari Libur banyak mobil plat B sementara orang bandungnya tidur dirumah. Padahal ada 60 Jenis makanan terdaftar di UNESCO.

Popong Djunjunan

DPR dibilang malas rakus, sekarang memang bebas Koran ngomong, sebut saja siapa orangnya, kalau yang disebut lembaganya semua kebawa dan mayoritas itu tidak malas kalau melihat berita yang negatifnya itu tidak benar positifnya juga banyak surat kabarnya juga akan laku kalau banyak yang jelek beritanya.

Walaupun sudah lewat Pilpres dan presiden terpilih kita harus mendukungnya selaku anggota DPR tidak bisa mendeskreditkan pemerintah karena kita dari KMP jadi siapapun presiden kalau programnya baik kita dukung kalau kurang baik yang kita kritik.

Komisi X membuat UU kedokteran kalau lulus jadi dokter harus mau ditempatkan di tempat terpilih 3 tahun karena memang selama ini hanya kota besar. Saya imbau jangan alergi terhadap partai maka siapa yang menggantikan kami kalau semua alergi terhadap Partai. Ada fenomena tidak suka terhadap Partai banyak yang menilai itu Partai kotor, maka siapa yang menggantikan kami, karena melalui Partai kalian dapat menjadi wakil rakyat. Mulai sekarang mudah-mudahan ada minat kesana karena kalau menjadi Wakil Rakyat banyak yang bisa kita kerjakan untuk rakyat siapapun kita maka ada semacam resep supaya sukses segera selesaikan Sekolah karena syarat untuk menjadi anggota DPR harus sarjana. Selain itu harus kerja keras dalam persaingan MEA, harus prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas.

Sesi tanya jawab dengan WNI di Lebanon

Ali Munajat /Mahasiswa Darul Fatwa Lebanon

Dia mempertanyakan kunjungan ke Lebanon dari delegasi GKS B Parlemen Lebanon terkesan sembunyi dan tidak pernah terekspos di Media massa.

Kerjasama Parlemen Lebanon point khususnya apa karena mereka tidak lebih baik dibandingkan dengan Parlemen Indonesia, sampai sekarang belum ada Presiden, apa yang special dari parlemen Lebanon itu apa yang bisa diambil. Sementara setiap kunjungan selalu rombongan pertanyaannya kenapa rombongan kalau memang tujuannya kerjasama dibidang politik, pariwisata bisa mengirimkan tim ahli yang dikirimkan ke Lebanon cukup 1-2 hari.

Yusuf/Mahasiswa Global Lebanon

Kondisi kerjasama antara Lebanon-Indonesia itu terkesan baik, bahkan penanganan visa pelajar ke Lebanon sulit bahkan diajukan 30 orang yang keluar itu 15 orang seolah-olah kesulitan melakukan visa dari Indonesia. apakah ada masalah tertentu terkait visa, kita minta solusinya agar pelajar yang ingin belajar di Lebanon lebih mudah seperti Malaysia tidak perlu berbulan-bulan bahkan dikasih Visa gratis?

Masalah Beasiswa sangat minim dibandingkan mesir dan Yaman, apa saja kesulitan dari Pemerintah atau ada masalah lain?

Lukman Hakim/GlobalUniversity

Salah satu program Joko Widodo itu melahirkan 2000 Doktor ada LPDP dimana ada dana pendidikan yang dikelola Menteri Keuangan, LPDP ini hanya dinikmati beberapa oknum saja. Pemerintah hanya menentukan beberapa kampus di Timur Tengah yang terbatas dibandingkan dengan eropa, LPDP belum terekspos di masuarakat karena sosialisasi masih minim, agar bisa dinikmati oleh para santri. Kita minta agar menggandeng ormas seperti NU dan Muhammadiyah terkait sosialisasi LPDP

Terkait dengan Santri dimana komunitas sangat besar pada pemerintahan sebelumnya banyak program pemerintah untuk pesantren,

program apa saja yang ditujukan oleh Pemerintah kepada pondok pesantren dalam memanfaatkan tenaga santri didalam dunia usaha.

Tanggapan Delegasi GKS B Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz

Kita declare GKS B ini kita undang 49 negara sahabat dan diliput media massa, ini sebuah program yang kita kondisikan dan menjadi alat kelengkapan di BKSAP. Kami akan melaporkan seluruh rangkaian kegiatan karena memang harus transparan dan akuntabel apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita tidak lakukan ini maka kita kuper seperti katak dalam tempurung, ibarat kita ingin tahu makanan Lebanon secara langsung kita ingin mempelajari kualitas dan makanan kita tidak bisa langsung dari youtube, kalau kirim orang lain maka sama saja tidak paham. Ini bentuk penghormatan kita terhadap Lebanon, ini negara ketiga yang mengakui kemerdekaan NKRI walaupun situasi politiknya tidak lebih baik dibandingkan Indonesia. kalau di Lebanon itu ada sharing power, presiden itu Kristen maronit, Parlemennya dari syiah. Kalau kita ingin menjadi leader kita harus mampu tampil, Lebanon menjadi penting untuk kita save Palestine, jika kita tidak bersahabat maka mereka bila ada acara internasional maka tidak pernah datang. Kita tidak sembunyi datang bahkan minta dijadwalkan dengan masyarakat. Kultur kita bersaudara dan bersilahturahim, ini bangunan kekeluargaan yang kita pelihara dan jaga ini suatu bentuk hubungan bernegara agar pergaulan kita bisa equal dan bangsa yang beradab menghormati bangsa lain saling kunjung mengunjungi jangan individual. Ini sama saja kayak di kampong saja kalau cuek maka tetangga tidak akan perduli karena tidak ada silahturahim.

Soal living cost memang dollar sedang tinggi sekali, kalau ukuran Indonesia mencapai 9100 rupiah hampir sama dengan dollar singapura. Kita coba push jangan sampai kalah dibandingkan berita dalam negeri persoalan DPR itu negative terus semua yang dilakukan DPR tidak baik karena adanya nilai setitik jadi curiga terus. DPR itu hanya 1 persen dari anggaran APBN, kenyataannya seperti itu. Ini saya sampaikan apa adanya, kita memang DPR harus kuat menampung semua aspirasi tidak boleh kalah jangan sampai lembaga tinggi negara itu lemah, jadi masyarakatnya harus kuat. LPDP untuk Lebanon juga harus diperhatikan dan ditingkatkan bahkan kalau perlu ditambah.

Popong Djunjunan/anggota GKS Lebanon

Pontren itu anggaran sangat besar karena dipesantren itu belajar dunia dan akhirat kami mendorong program itu.yang utama kita harus bekerja

Ishak/Lokal staf KBRI Beirut, Lebanon

Warga Masyarakat Indonesia sudah peka lagi terhadap politik, semua masyarakat Indonesia di Lebanon peka sekali terhadap politik Indonesia dan memperhatikan anggota Dewan di Indonesia. contoh soal pekanya soal papa minta saham.

Sementara terkait anggaran Kemenlu, dia mengatakan, anggaran Kemlu itu sangat kecil bahkan berimbang kepada Anggaran KBRI Beirut, anggaran Kemlu itu 5 triliun, sementara anggaran DPR itu jangankan seluruh Satker biaya reses itu hampir sama seperti anggaran Kemlu.

Kenaikan tunjangan kementerian keuangan tidak menggolkkan kenaikan tunjangan yang diusulkan anggota DPR patut diapresiasi. Selanjutnya sekarang ini muncul trending topic dan bekerja satu tahun dan sisa empat tahun yang akan dilalui, media massa menilai anggota DPR kerjanya kurang maksimal itu bukan warga yang menilai tapi anggota DPR sendiri yang menilai.

Selain itu, lanjutnya, di pemberitaan Media massa menerangkan bahwa anggota DPR periode 1 oktober sampai sekarang kerjanya banyak yang malas-malasan contoh banyak agenda legislasi atau UU dari 39 UU yang diagendakan hanya 3 UU yang terealisasi. Menurutnya, contohnya soal Rapat Paripurna yang dihadiri 114 anggota dari 560 orang anggota Dewan sampai Wakil Ketua meminta ditunda tidak dilanjutkan mohon klarifikasiya dari rangkaian itu dan tanggapannya.

Rinaldi/Mahasiswa Lebanon

Saya ingin mengetahui perkembangan negoisasi Freeport kalau tadi disinggung semua elemen WNI di Lebanon mampu mempromosikan Indonesia saya merupakan orang yang getol mempromosikan Indonesia. Untuk Freeport kita tahu sudah ada buku yang jelas membahas Freeport sendiri.

Kamaludin//Mahasiswa Darul Fatwah Lebanon

Minta pendapat ada Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, begitu banyak sumbe daya manusia dari Ilmuwan dari Luar negeri sangat disayangkan mereka tidak bisa dibawa kembali ke Indonesia, banyak Ilmuwan yang hebat bahkan pembuat mobil listrik diproduksi di Malaysia, Indonesia sendiri tidak memberikan lahan kepada mereka. Saat ini ekonomi Indonesia khususnya perusahaan Indonesia banyak dikuasai oleh asing, Tenaga kerja banyak dikelola oleh asing, pemerintah bisa memberikan apresiasi dan lahan banyak keluhan dari mahasiswa yang tidak mendapat dukungan. Mahasiswa kita sedikit diberikan dana dibandingkan mahasiswa asing. Di DPR itu katanya nilai setitik rusak susu sebelangak, bagaimana menghilangkan titik tersebut, karena bisamerusak seluruhnya apalagi persoalan di Ketua DPR, kalau Ketua bermasalah apalagi anggotanya, ambil susu yang baru jangan biarkan membusuk.

Rahman/Staf local KBRI Beirut

Dia mengatakan, ketika mendengar akan adanya serangan fajar 1 Januari 2016 dengan masuknya produk dan Tenaga kerja asing di Indonesia membuat saya merinding. Bahkan belum lama saya mendengar warga negara kita banyak dipulangkan Indonesia, UU telah disusun oleh DPR untuk membuka kran MEA. Tenaga ahli WNI diluar banyak begitu di Indonesia tidak dihargai justru sampai orang berjasa sampai di Indonesia tidak dihargai, bahkan di Kementerian atau kedutaan kadang orang atas atau pimpinan kalau lihat staf asing itu beda dari perhatian atau staf agak lain. Orang asing lebih dihormati dibandingkan orang Indonesia. ini satu kedutaan apalagi satu departemen. Perlu dipertimbangkan lagi seperti kami local staf sampai Indonesia potensi kerja sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, untuk meningkatkan pariwisata garda terdepan salah satunya yaitu imigrasi didepan mata wisata orang luar itu masuk ke Indonesia, bahkan orang luar nilai ini banyak pungli. sekira dikasih kesempatan itu kasih anak muda yang berpotensi sehingga bisa naik yang muda karena mereka banyak duitnya dibandingkan yang muda. Saya yakin saya tidak suudzon, pasti ada nilai plusnya, alangkah baiknya bila ada masalah segera turun, maka malu melihatnya dan jika perlu membuat pakta integritas.

Ketua Delegasi GKSB Parlemen Lebanon Irgan Chairul Mahfiz

Menurutnya, dirinya sangat mengapresiasi apa yang diutarakan tadi, seperti anggaran DPR lebih besar dibandingkan dengan Kemenlu. DPR 2.5 persen dibandingkan Kemenlu, 2015 itu hanya dapat 3.5 triliun kalau naik itu ada tambahan tempat alun-alun demokrasi. Sekarang anggota DPR punya 5 tenaga ahli 2 sespri, lebih kurang 4000-5000 orang, lift hanya tujuh unit kebayang tidak hanya runtuh. Itu kalau mau naik tenaga ahli bisa satu jam. Gedung DPR dulu tidak dikondisikan dibandingkan kondisi sekarang dulu tahun 1997 hanya 500 orang sekarang staf hanya di fraksi. Ini bukan excuse bukan membela diri, kalau dikasih sekarang yah tidak apa-apa. Tidak dapat dana aspirasi tidak apa-apa, DPR minta 3 miliar itu bukan memperkaya diri, yang kerja itu pemerintah, bantu gereja, bangun irigasi, dan sebagainya. Ini bukan dikantongin, uangnya tidak lihat hanya kasih program.

Sekarang ini kalau ke Daerah ajak temannya di DPRD provinsi, jika tidak dikasih dana aspirasi tidak apa-apa, dikasih rumah aspirasi juga tidak dikasih. Demi cinta bangsa saya datang kemari nombok. Batalnya sidang paripurna juga karena banyak yang mengawal Pilkada bahkan juga tidak menutup kemungkinan itu ada yang malas.

Pemerintah tidak hanya fungsi eksekusi tetapi juga ada fungsi legislasinya. Banyak faktor kenapa legislasi kurang karena juga ada SDM yang masih belum merata, ini representasi masyarakat yang harus kita terima. Bahkan susah payah menyusun UUD ada dua orang mengajukan judicial review jadi batal itu UUD. Kasus papa minta saham itu termasuk etika kalau tidak punya kepantasannya yah harus turun, dia speaker bukan komandan atau kepala, karena memang sesunguhnya sama. Kenapa ditambah anggaran fungsi pengawasan. Karena ada reses 150 juta itu 15 titik satu titik 10 juta untuk tenda, uang transport, spanduk. Itu bukan dikantongin, yang kita terima itu transportasinya. Pemilu 2014 itu ongkos politiknya gede, kalau orang investasinya keluar duit banyak dapatnya tidak besar, lebih bagus buka lahan dan turn overnya juga tinggi.

Menurutnya, ini resiko politik karena memang politik itu perjuangan bukan cari untung kalau orang menganggap politik itu ibadah dia harus

siap dengan konsekuensinya. Kalau memang urusan konstituen mulai bangun subuh ada orang disitu. Sekarang ini orang mau sunatan minta, pindah rumah minta kepada wakil rakyatnya. Hal itu memang dirasakan tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk mengabdi bagi bangsa dan negara karena kami tahu pasti banyak orang yang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Ini bukan tempat lagi cari duit lagi di DPR lebih baik jadi pengusaha murni. Kita sekarang mau ketemu bupati, SKPD takut akibat mata KPK dimana-mana. Tidak ada lagi kita punya privasi semua bebas disadap.

Popong Djunjunan/anggota GKS B Parlemen Lebanon

Dia mengatakan memang betul banyak Ilmuwan kita tidak dianggap atau kurang dihargai di dalam negeri padahal semestinya diberikan kesempatan untuk mengabdi di Indonesia dengan memberikan kemampuannya kepada bangsa dan tanah air. Ini memang sudah kita tangkap betul persoalan yang ada.

Saat Pertemuan dengan KRI Bung Tomo-357 UNIFIL di Pelabuhan Beirut, Lebanon, tamggal 15 Desember 2015

Ketua Delegasi Irgan Chairul Mahfiz :

Bapak komandan Yayan Sophian dan tantama yang berada di Kapal KRI Bung Tomo, staf jajaran KBRI Beirut di Lebanon, dan anggota GKS B Parlemen Lebanon, kami merasa kagum dan bangga pada seluruh tentara nasional Indonesia yang dipercaya oleh bangsa. Karena memang tidak semua tentara dapat memakai baret UNIFIL ini.

Yang memakai baret ini menjadi kehormatan bagi bangsa. Indonesia terkenal bersahabat di mata dunia internasional karena itu harus kita jaga, jangan tercemarkan, reputasi yang dipegang hendaknya tetap dipertahankan, seluruh prajurit di KRI Bung tomo memiliki prestasi yang sangat fenomenal yaitu membantu penyelamatan korban Air Asia. Kami mengharapkan para prajurit dapat melaksanakan tugas dengan baik walaupun ada persoalan pribadi keluarga, dapat dijalankan dengan tabah, yang kami apresiasi saudara dapat menjalankan tugas yang besar dalam menjaga nama bangsa.

Kami berharap ketika kembali ketanah air dapat melakukan operasi besar lainnya, karena kita merupakan negara bahari dan negara maritime kekuatan TNI AL harus berada terdepan menjaga kesatuan bangsa dan negara. Kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kesempatan kali ini.

Paparan Kolonel Yayan Sofiyan terkait kesiapan KRI Bung Tomo dalam menjalankan tugas UNIFIL di Lebanon.

Kolonel Yayan Sofiyan, S.T :

Secara universal terdapat peran universal role diantarnya militer, dan peran polisioner atau constabulary dan dan diplomatic dengan kapal perang yang canggih dapat menjadi penggetar bagi negara lain. Indonesia pernah mengikuti multilateral exercise Kakadu 2012 dan menjadi juara, dalam bidang constabulary kita pernah menangkap ada 2100 kilo liter bahan bakar yang kita tangkap dan diproses pengadilan dan dikembalikan oleh negara. Itu peran strategis angkatan laut yang strategis seperti fungsi militer, constabulary dan diplomatic.

Kalau melihat peta dunia kita diwarisi potensi yang begitu besar semoga kunjungan ini dapat menjadi input dari 90 persen perdagangan dibawa oleh laut sementara 40 persen melalui Indonesia sampai saat ini kita belum maksimal memanfaatkannya banyak dimanfaatkan oleh Singapura kedepan kita harapkan dapat membalikkan kejayaan maritime. Kita menjadi jembatan pasifik dan samudera Hindia, penghubung utara dan selatan. Kita memiliki SDA emas, tembaga dan apa saja. Kita harus meningkatkan potensi maritime, bahkan pembangunan sekarang mal tempat tinggal laut itu dipunggungi seharusnya negara maju itu pembangunan selalu menghadap ke laut.

Potensi perikanan dan laut kita sangat besar karena kita berada di jalur imigrasi ikan disini wilayah dingin dan panas kalau mau berkembang biak mereka di perairan Indonesia dan potensi tinggi adanya di Indonesia. Pelabuhan kita cukup ramai tapi masih kalah dibandingkan singapura dengan lima pilar poros maritime dan tol laut kedepan sumber devisa baru dari sector maritime akan memberikan kesejahteraan yang lebih

besar wisata, budaya, sumber daya alam pertanian dan sebagainya.

Teknologi sekarang berkembang begitu cepat, karena itu kita perlu didukung performa kapal yang bagus dan canggih jadi bamboo runcing itu tidak cukup, kita harus punya alat yang modern, hebat dan kuat. Kawasan meditierian ini sangat menggiurkan banyak kapal perang yang berlayar kita disini merupakan peace keeper di Lebanon, fasilitas tempur kita semua dalam kondisi siap, pencapaian kondisi teknis sudah dilakukan inspeksi dan mendapat predikat sempurna dari PBB, baik heliport, platform yang ada disiapkan oleh Mabes TNI dengan baik. Logistik dan bahan bakar semua terpenuhi dengan baik. Personil 107 orang.

Pertemuan dengan Komite Luar Negeri Parlemen Lebanon

tanggal 15 Desember 2015. Siang.

- 1. Mr. Abdul Latif Zein**
- 2. Mr. Farid El Khazen**

Mr. Abdul Latif Zein

Banyak hal yang bisa kita kerjasama selain politik, dan ekonomi seperti persoalan terorisme menjadi isu yang penting saat ini, karena Lebanon dikelilingi oleh negara seperti suriah dan Irak. Ini sangat krusial keterlibatan Indonesia didalam UNIFIL dan kami mengapresiasi keterlibatannya di UNIFIL. Kami merasa terhormat dengan keterlibatan Kapal Perang Indonesia di Lebanon maupun tentaranya. Kami juga merasa terhormat atas undangannya kami meminta undangan resmi kepada ketua Parlemen Lebanon agar dapat mengunjungi Indonesia.

Ketua Delegasi GKSB Parlemen Lebanon Irgan Cairul Mahfiz

Kami Indonesia juga perduli terhadap persoalan terorisme dan kami juga pernah mengalami persoalan beberapa terorisme tapi bisa kita tangani, kami mendorong adanya kerjasama saling mendukung dalam memberantas terorisme. Untuk mengantisipasi terorisme kita harus mencegah bibit terorisme sejak dini, Dalam konteks internasional kita juga mendukung pemberantasan terorisme karena itu kita mengirim tentara

kita di UNIFIL dengan jumlah yang besar di Lebanon. Kita memiliki kurang lebih 1000 orang, baru saja kita mengunjungi kapal perang kita di Beirut, itu merupakan kapal perang terbaru kami miliki, dengan fasilitas rudal dan itu kita beli setahun lalu. Selain itu, yang kami kirimkan juga perwira terbaik ke Lebanon dalam menjaga keamanan di Lebanon.

Selain militer mereka juga memiliki tugas diplomasi di Lebanon dimana sampai sejauh ini kita mencoba untuk memberikan terbaik di Lebanon ini. Ada persoalan mahasiswa kita yang ingin belajar di Lebanon kesulitan mendapatkan visa belajar kita memohon bisa dipermudah jangan sampai berbulan-bulan mendapatkan visa Lebanon.

GKSB Parlemen Lebanon ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama dengan parlemen Lebanon, dan kita merupakan negara sahabat sejak lama. Kerjasama ini melibatkan berbagai aspek tidak hanya dibidang politik, pariwisata dan juga sikap bersama menghadapi terorisme.

Kehadiran di berbagai temu parlemen internasional perlu didorong untuk meningkatkan kerjasama diberbagai bidang khususnya terorisme karena itu kami tidak ragu menempatkan tentara kami di Lebanon baik yang berada di perairan Lebanon maupun di perbatasan Lebanon Selatan. Dengan kekuatan yang cukup lengkap kita berikan untuk Lebanon,

Kami merasa terhormat dengan kunjungan ke Lebanon, kami juga ingin hubungan Indonesia Lebanon dapat semakin kuat kedepannya. Selain itu Kami mengharapkan yang mulia dapat berkunjung ke Indonesia untuk melihat langsung kondisi Indonesia.

Selain itu kita berharap adanya MOU dengan Parlemen Lebanon dan membangun sikap bersama dalam pemberantasan terorisme antar kedua Parlemen.

Pertemuan Delegasi GKSB Parlemen Lebanon dengan Group Kerjasama Bilateral Lebanon-Indonesia seusai dengan Komite Luar Negeri Parlemen Lebanon, 15 Desember 2015.

- 1. Mr. Mohammad Hajjar (Mustaqbal)**
- 2. Mr. Henry Helou (Independent)**
- 3. Mr. Ali Fayyad (Hizbullah)**

Mr. Mohammad Hajjar (Mustaqbal)

Anggota GKS Lebanon terdiri dari berbagai partai, kami sangat senang dan bahagia ini pertemuan pertama kali pertemuan antara GKS Parlemen Lebanon dengan Indonesia. Kami menggaris bawahi kerjasama antara Indonesia dengan Lebanon. Banyak point kesamaan antara Lebanon dengan Indonesia. Jadi pertemuan ini harus sering dilakukan bukan hanya memperkuat hubungan masyarakatnya tetapi juga antar parlemen. Pertama kali saya sampaikan selamat atas terpilihnya Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan kami juga dapat memilih Presiden di Lebanon.

Jadi memang kami melihat Indonesia dengan kebijakan politik luar negerinya sangat tepat, dengan nol musuh seribu kawan. Ini memang yang sedang kami usahakan meskipun kita garis bawahi keberadaan Israel merupakan musuh yang paling utama. Itu menjadi musuh kita selama mereka menjajah bangsa arab khususnya bangsa Palestina ditanah mereka sendiri. Untuk kesempatan kali ini kami sangat menghormati dan mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menjaga hak mereka. Kami bangga dan mengapresiasi tidak adanya kedutaan besar Israel di Indonesia. Jadi kami menggaris bawahi dan mengapresiasi keputusan Indonesia tahun 2006 yang meletakkan tentaranya di Lebanon selatan pada bulan Juli 2006 sampai sekarang. Kami ingin menyampaikan pendapat dan sakma dengan Indonesia menolak radikalisme dan paham mengfakirkan orang yang mengaku itu ajaran islam dimana itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Indonesia berhasil menjaga negaranya selama kurun waktu 50 tahun. Kami melihat Indonesia telah berhasil mencegah masuknya paham dan radikalisme tadi dimana kami lihat bangsa Indonesia itu bersatu. Indonesia berhasil mencegah paham radikalisme masuk ke negaranya itu sangat menarik bagi kami untuk belajar dari Indonesia. Kementerian luar negeri Indonesia sangat perhatian terhadap persoalan ini dan merencanakan kerjasama kedua negara dalam pemberantasan terkait paham radikalisme dan telah terjadi dua kali pertemuan membahas soal radikalisme. Kami akan selalu untuk siap bergabung dengan Indonesia dalam berbagai forum dan dialog untuk menciptakan perdamaian di dunia

islam dan internasional.

Kami sampaikan hubungan perekonomian Indonesia dan Lebanon sangat terbatas pada tahun lalu melalui laporannya sangat disayangkan sector ekspor dan impor Indonesia-Lebanon nilainya belum melebihi 1 juta dollar, dan bagi Indonesia masih 7.5 juta dollar. Meskipun sejak tahun 1999 sudah ada MOU pada bidang perekonomian Indonesia-Lebanon jadi inilah pentingnya kita memperkuat kerjasama mengembangkan potensi perekonomian antara kedua negara.

Popong Djunjunan

Posisi Lebanon sangat strategis, apakah perlu ada atase pertahanan di Lebanon?

Mr. Henry Helou (Independent)

Dia mengatakan, Parlemen Lebanon secara khusus mengapresiasi yang tinggi terhadap Indonesia jadi memang persoalan di Lebanon adanya perselisihan antar kelompok rakyat Lebanon itu bersatu dan tidak tercerai berai. Kalau kita lihat keadaan situasi di Lebanon menurut saya, negara yang aman dan stabil. Meskipun begitu kita garis bawahi dalam melawan organisasi yang mengkafirkan orang seperti ISIS, saya sampaikan saya wakil dari daerah Lebanon selatan tempat UNIFIL berada, saya sampaikan apa yang telah di lakukan tentara Indonesia di Selatan itu menjadi contoh terhadap tentara lainnya. Tentara Indonesia sangat dicintai oleh masyarakat Selatan, mereka bergerak dengan penuh tanggung jawab, bertingkah dengan etika dan moral serta bekerjasama dengan masyarakat setempat. Jadi memang terjadi beberapa perselisihan antara masyarakat Lebanon dengan kekuatan internasional lain tetapi tidak dengan Indonesia. Titik tempat tentara Indonesia di Selatan kurang lebih 2 km saya selalu mengirimkan support dan terima kasih kepada para tentara. Untuk urusan atase keamanan Indonesia disini itu kewenangan Kementerian Luar negeri tetapi kami siap mendampingi atau mengiringi proses tersebut.

Menteri luar negeri Indonesia yang meminta memperketat visa pelajar Indonesia Lebanon dikarenakan inidkasi adanya persoalan maraknya

radikalisme ISIS di kawasan Timur Tengah, karena memang informasi yang kami dapat ada 56 orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS, Kementerian Luar negeri Indonesia jadi meminta untuk memperketat pengeluaran visa belajar bagi mahasiswa/l Indonesia.

Terkait persoalan visa, dirinya pernah mengalami hal yang sama visanya tidak distempel dan akhirnya ditolak di Paris harus kembali ke Lebanon. Selain menyinggung kerjasama MoU TKI didalam sector pariwisata dan infrastruktur AKAN dibahas dan disampaikan mendatang. Persoalan Visa kita berharap kedepan tidak terjadi lagi dan bagi mahasiswa yang ingin belajar bisa semakin cepat memperoleh visa belajarnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kunjungan Delri GKSBN DPR RI - Parlemen Lebanon ke Lebanon pada tanggal 10 – 16 Desember 2015, secara umum berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif bagi Indonesia. Kunjungan ini dinilai positif untuk menunjukkan dorongan Parlemen Indonesia dalam meningkatkan kerjasama di bidang pariwisata dengan Lebanon khususnya, dan menggali potensi kerjasama pada level kawasan di Timur Tengah
2. Kunjungan Group Kerjasama Bilateral Parlemen Lebanon dapat menjadi sarana dan peningkatan kapasitas building demokrasi DPR RI dengan parlemen di Lebanon. Selain itu, Parlemen Indonesia juga dapat membagi kemampuan dan pengalaman demokrasi Indonesia yang mampu menselaraskan antara Islam dan Demokrasi secara damai.
3. Dalam kunjungan ini diidentifikasi sejumlah potensi kerjasama antara kedua negara diantaranya menjadi ajang tukar pikiran bagaimana mengelola pariwisata kedua negara, yang hampir memiliki kesamaan potensi wisatanya diantaranya cagar budaya, maupun pantainya yang indah. Selain itu, perlu digali kemungkinan kerjasama MoU di sector kerjasama TKI dan infrastruktur.
4. Kedua Parlemen sepakat perlu ditingkatkan kerjasama dalam mencegah dan menanggulangi berbagai paham radikalisme dan terorisme antara

kedua negara baik ditingkat kawasan Regional maupun Internasional. Islam yang radikal tidak mencerminkan Islam sejati yang mencerminkan perdamaian dan saling menghormati sesama umat beragama.

5. Keberadaan UNIFIL di Lebanon telah memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas keamanan di Lebanon selama ini. Karena itu, keterlibatan TNI di dalam UNIFIL patut diapreasiasi positif dengan memberikan dukungan dari sisi peningkatan anggaran maupun semangat bagi pasukan TNI yang bertugas di Lebanon.
6. Lebanon merupakan salah satu negara yang secara konsisten mendukung integritas wilayah R.I Selain itu, Lebanon merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, DPR mendukung penuh Lebanon yang damai dan mampu menjaga stabilitas keamanan dalam negerinya. Karena posisi Lebanon di Timur Tengah menjadi sangat penting sebagai penyeimbang dalam menjaga stabilitas di kawasan yang sedang bergejolak.

B. SARAN

1. Merangkum berbagai catatan dari hasil kunjungan Delegasi GKSBDPR RI-Parlemen Lebanon di Lebanon tersebut, diharapkan kiranya agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua pihak dan khususnya juga menjadi "concern" dari seluruh anggota Delri GKSBDPR RI, dapat dikoordinasikan dengan berbagai kalangan terkait pemerintah di Indonesia, untuk dapat ditindaklanjuti secara nyata guna mendapatkan kemajuan yang berarti bagi pengembangan kunjungan kerjasama bilateral antara RI dan Lebanon, yang tentunya lebih ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia.
2. Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSBDPR) ini diharapkan kedua belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik.

3. Terkait hubungan antar Parlemen, diharapkan hubungan antara kedua parlemen dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, baik dalam hal saling kunjung, maupun dalam bentuk lainnya.

Jakarta, Februari 2016
GKSBN DPR RI – Parlemen Lebanon
Ketua Delegasi

ttd

H. Irgan Chairul Mahfiz
A-535



LAPORAN
DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR RI – PARLEMEN IRAN
KE IRAN
TANGGAL, 12 – 18 DESEMBER 2015

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015

LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL
(GKSBB)
DPR-RI – PARLEMEN IRAN
KE IRAN, TANGGAL 12– 18 DESEMBER 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSBB) dengan 49 parlemen negara-negara sahabat. Adapun tujuan pembentukan GKSBB ini adalah untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang melalui parlemen. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI telah mengirim Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Iran untuk melakukan kunjungan ke Iran pada tanggal 12– 18 Desember 2015.

5Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSBB) DPR RI – Parlemen Iran ke Iran dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 27/PIMP/II/2015-2016 tanggal 30 November 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Iran ke Iran dari tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 2015.

B. Susunan Delegasi

Adapun susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSBB) DPR RI – Parlemen Iran adalah :

1. Mustofa Assegaf F-PPP/Ketua Delegasi/Kom. VI
2. Jalaludin Rahkmat F-PDI-P/Anggota Delegasi/Kom VIII

3. Mustafa Kamal	F-PKS/Anggota Delegasi/Kom II
4. M. Arief S Suditomo	F-Hanura/Anggota Delegasi/Kom I

Selama melakukan kunjungan ke Iran, Delegasi didampingi pejabat dari Biro Kerjasama Antar Parlemen dan pejabat KBRI di Teheran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Iran, adalah :

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Iran.
- b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara.
- c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan baik dalam hubungan kedua negara maupun terkait permasalahan yang terjadi di belahan dunia, peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan dan energi dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional.

D. Persiapan Pelaksanaan Kunjungan

Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke negara sahabat, Delegasi melakukan rapat internal GKSB dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait program kunjungan dan hubungan bilateral Indonesia – Iran.

E. Program Kegiatan

- a. Pertemuan dengan Dubes RI di Teheran beserta jajarannya
- b. Diskusi tentang gambaran mengenai hubungan bilateral Indonesia- Iran serta isu-isu dalam negeri Iran.
- c. Pertemuan dengan Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri
- d. Pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia
- e. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani

II. HASIL KUNJUNGAN

Dalam kunjungan bilateral Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR-RI-Parlemen Iran ke Iran, selain mengadakan pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran, Delegasi juga telah mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di Parlemen Iran.

1. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Teheran

Delegasi diterima oleh Duta Besar RI Y.M. Dian Wirengjurit beserta beberapa pejabat KBRI di Kantor KBRI pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2015. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan oleh Dubes penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi KBRI Teheran, sebagai perwakilan bilateral yang diakreditasikan untuk Iran.

Duta Besar menyampaikan bahwa Iran termasuk 5 besar negara yang memiliki alih teknologi dan hak paten. Iran merupakan negara yang sudah mempunyai teknologi yang tidak kalah dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hal ini terbukti bahwa Iran dapat menangkap pesawat drone tanpa awak Amerika Serikat yang menyeberang ke perbatasan Iran. Iran sudah dapat membuat drone menyamai teknologi buatan Amerika Serikat. Dalam hal ini, pihak Iran menawarkan drone buatan Iran. Dubes menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berkeinginan membeli drone dari Iran.

Mahasiswa Indonesia banyak terdapat di kota Kum, kebanyakan mahasiswa belajar studi Islam.

Terkait tenaga kerja Indonesia, Dubes juga menyampaikan bahwa terdapat sekitar 20 orang TKI ilegal di Iran. Mereka berada di Iran berasal dari TKI yang tidak mempunyai pekerjaan lagi di negara lain, lalu dibelokkan dari Dubai ke Iran.

Sementara itu, terdapat sekitar 5000 orang Iran yang belum terdeteksi berada di Indonesia. Sebagian dari mereka ada yang berstatus tahanan. Dalam hal ini, pihak Iran meminta agar tahanan tersebut dapat dideportasi ke Iran dengan alasan di Indonesia sangat crowded dan tidak ada kepastian hukum.

Di bidang ekonomi, Iran termasuk negara yang ekonominya kuat, namun bukan berarti stabil, mengingat kurs dollar ke Rial (IRR) tidak stabil.

Disampaikan bahwa terdapat 5 perusahaan besar Iran yang berkeinginan melakukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Salah satu perusahaan tersebut sudah lama melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam pembangunan PLTG di Belawan yang tadinya bermasalah semasa di bawah perusahaan asing. Dalam rangka rencana Indonesia mencanangkan program listrik 35.000 Megawatt - Iran telah menyampaikan niatnya untuk kerjasama.

Disampaikan bahwa kebutuhan listrik di Iran sangat memadai. PLN di Iran menggunakan gas dan minyak bukan tenaga nuklir. Iran juga sudah memanfaatkan teknologi tenaga matahari (solar power) dalam mencukupkan kebutuhan listrik.

~~Dalam rangka memajukan hubungan ekonomi dengan Iran di bidang energi, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Luar Negeri. Retno Marsudi telah melakukan kunjungan ke Iran. Disampaikan bahwa Pertamina berkeinginan melakukan investasi di Iran - daerah laut Kaspia.~~

Di bidang penerbangan, Indonesia sudah memberikan Green Light kepada perusahaan Iran untuk menjajaki penerbangan sektor Iran-Jakarta-Bali-Iran. Bahkan Lion Air sempat berkeinginan membuka penerbangan ke Iran, namun menyurutkan niatnya karena sulit mendapatkan perusahaan asuransi yang mau kerjasama. Sebaimana diketahui, asuransi perusahaan penerbangan Iran diberikan oleh pemerintah Iran, bukan pihak swasta.

Dalam pemerintahan, memang unik karena Presiden Iran dan Ketua Parlemen bukanlah decision maker, tapi Ayatollah Seyyed Ali Khamenei yang merupakan pengambil keputusan. Terlebih lagi, sebagaimana diketahui bersama bahwa Iran mempunyai pasukan yang dikenal dengan Garda Revolusi. Garda Revolusi ini mempunyai otoritas yang kuat dalam bisnis minyak-dapat dikatakan pemain utama bisnis minyak Iran. Iran termasuk negara kaya, namun banyak membiayai perang di Suriah dan dukungan ke Hizbullah di Lebanon dan pihak lain di Timur Tengah.

Di sisi lain, Parlemen disebut garis keras, sehingga Presiden Iran Rouhani mengalami kesulitan menghadapi Parlemen terkait dengan pencabutan sanksi barat mengenai nuklir. Parlemen masih diisi oleh para mullah. Diketahui bahwa dalam perjanjian nuklir terdapat 158 butir. Butir-butir kesepakatan antara Iran dan negara-negara barat tidak akan dapat diselesaikan atau

diimplementasikan sekaligus, tapi secara bertahap. Diperkirakan antara 8-9 tahun perjanjian nuklir tersebut baru dapat dipenuhi- sanksi dicabut seluruhnya.

2. Petemuan dengan Mr. Boroujerdi, Ketua Komisi National Security and Foreign Policy, Parlemen Iran tanggal 13 Desember 2015

Ketua GKSBDPR-RI - Parlemen Iran, Mustafa Ali Assegaf, sekaligus Ketua Delegasi menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan kepada Delegasi sekaligus terimakasih atas kesempatan pertemuan yang sudah diatur oleh pihak Parlemen Iran atas kunjungan delegasi. Ketua Delegasi menyampaikan kunjungan ini menandakan bahwa hubungan Indonesia dan Iran sudah semakin erat. Diharapkan ke depan akan semakin meningkat baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan dan teknologi.



Ketua GKSBDPR-RI, Mustafa Assegaf sedang berbincang dengan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar negeri, Parlemen Iran, Mr. Boroujerdi, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar dan punya tempat khusus. Hubungan Indonesia-Iran tidak hanya di Parlemen tapi juga ditingkat bisnis dan budaya. Beliau menyampaikan bahwa terdapat organisasi yang di desain oleh Amerika Serikat dibantu Israel untuk mencoreng Islam. Untuk itu perlu adanya peningkatan perdamaian. Beliau menyampaikan bahwa terbunuhnya orang-orang yang mengatasnamakan Islam adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Allah. Terbunuhnya orang-orang tak berdosa adalah sangat tidak manusiawi. Beliau menyampaikan keprihatinannya atas terbunuhnya 13.000 orang di Yaman dan 5000 orang

anak tak berdosa di Yaman, akibat perang konflik.

Dalam kesempatan pertemuan, Mustafa Kamal menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan negara Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. Dalam mewujudkan dukungan tersebut, DPR-RI telah lama membentuk Caucus Palestina. Disampaikan agar jangan sampai agenda ISIS menghambat kemerdekaan Palestina. Bagi Indonesia, kemerdekaan Palestina merupakan harga mati sebagaimana disampaikan Soekarno (founding father Indonesia) di PBB. Indonesia bekerja sama dengan negara lain mendukung kemerdekaan Palestina tidak hanya sebagai peninjau di PBB, tapi menjadi sebagai anggota PBB.

Jalaluddin Rahmat, anggota Komisi VIII yang membidangi agama, menyampaikan bahwa Indonesia masyarakatnya bebas memilih mazhab. ▶ Banyak yang dapat dipelajari dari revolusi Iran di bidang agama. Hubungan Indonesia dengan Iran perlu dilakukan peningkatan di bidang keagamaan, ideologi agama, pendidikan, pertahanan dan ekonomi.

Mr. Boroujerdi menyampaikan bahwa untuk menjaga keharmonisan dan persatuan antara Syiah dan Sunni, di Iran setiap tahun diadakan pertemuan antar mazhab.

Beliau juga menyampaikan bahwa Iran tidak setuju dengan senjata nuklir - Iran menentang senjata nuklir. Iran adalah negara cinta damai. Iran bertahan dari musuh bukan menyerang.



Delegasi GKSB DPR-RI berfoto bersama dengan Ketua Komisi Luar Negeri serta anggota Parlemen Iran

A. Pertemuan dengan Mr. Koochakzadeh, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia tanggal 13 Desember 2015

Ketua Kelompok Persahabatan Iran-Indonesia menyampaikan bahwa hubungan Indonesia-Iran sudah lama terjalin baik - sudah merupakan sejarah panjang.



Ketua GKSBD DPR-RI-Iran, Mustofa Assegaf sedang berbincang dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran, Mr. Koochakzadeh

Ketua Delegasi, Mustofa Assegaf menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan oleh Parlemen Iran atas kedatangan Delegasi. Beliau menyampaikan bahwa seharusnya jumlah anggota delegasi lebih banyak, tapi karena satu dan hal hanya 4 orang anggota parlemen yang bisa hadir. Namun, diharapkan tidak mengurangi rasa hormat dan arti kunjungan delegasi.

Mr. Koochakzadeh menyatakan bahwa sejak Iran mengalami revolusi Islam tahun 1979, Iran tidak pernah mempermasalahkan atau mempertajam perbedaan Sunni dan Syiah. Kelompok yang mengatasnamakan Islam membunuh orang, bukanlah Islam Syiah.

Ada dugaan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang bertujuan menjauhkan Syiah dari Sunni. Sangat disayangkan ada negara yang mendukung kelompok-kelompok pemecah. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran Amerika Serikat selama OPEC bersidang 8 hari difasilitasi oleh Arab Saudi dan Kuwait. Menurunnya harga minyak yang rugi adalah produsen minyak, termasuk negara-negara Timur Tengah. Sangat disayangkan suatu negara seharusnya dapat membantu negara Islam lainnya.

Konflik di Suriah harus dihentikan dan beliau mengharapkan Indonesia dapat mendukung penolakan penjatuhan Bashar Al Asshad, seperti diketahui PBB mengeluarkan Resolusi tentang penjatuhan Presiden Suriah dimaksud. Dalam hal ini, sangat diharapkan agar GKSBB dapat membentuk komisi khusus Palestina dan menyebarkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menanggapi hal itu, Mustafa Kamal menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai Caucus Palestina yang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Delegasi DPR-RI sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Palestina baik ke Gaza dan Tepi Barat untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di sana. Iran dan Indonesia merupakan yang terdepan membela kemerdekaan Palestina melalui sidang PBB, konferensi parlemen baik internasional maupun regional.

Disampaikan pula bahwa Indonesia akan membuka perwakilan di Ramallah, Palestina. Islam adalah perdamaian dunia, untuk itu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan perdamaian pula. Hal yang harus segera diselesaikan adalah masalah ISIS, dengan demikian bisa membangun skema pembangunan di Timur Tengah. Seluruh dunia harus bersatu baik Barat maupun negara Islam untuk memberantas ISIS. Korban ISIS tidak hanya kaum Syiah, tapi juga agama lain dan kelompok-kelompok lain.

Mr. Koochakzadeh mengusulkan agar kedua GKSBB dapat membawa pesan mengutuk ISIS dan serangan Arab Saudi ke Yaman.

Di tengah diskusi, Arief Suditomo menyampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota DK tidak tetap PBB yang akan dipilih pada 2019 dan meminta dukungan Iran.

Menanggapi hal ini, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia, Mr Koochakzadeh, menyampaikan bahwa Iran akan sangat mendukung Indonesia jadi calon anggota DK tidak tetap PBB. Iran selalu mendukung negara Islam dalam organisasi internasional. Beliau juga menyampaikan adanya rencana Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia berkunjung ke Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan ini, sebelum masa jabatan mereka berakhir.

Anggota Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia, Mr. Najadi Islam, mengimbau agar parlemen lebih bersuara terhadap peristiwa atau kejadian yang menimpa suatu negara yang dianggap tidak adil dan berdasar

seperti yang terjadi terhadap Suriah dan Yaman. Pemerintah Iran lebih aktif menyelesaikan masalah, seandainya pemerintah tidak berbuat, maka parlemen lah yang seharusnya menyuarakan, karena parlemen bersifat lebih bebas bersuara dan berdialog.

Pertemuan dilanjutkan dengan makan malam bersama yang dijamu oleh Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Iran-Indonesia.



*Delegasi GKSBDPR-RI berfoto bersama dengan Ketua GKSBD
serta anggota Parlemen Iran.*

4. Pertemuan dengan Yang Mulia, Ali Larijani, Ketua Parlemen Iran tanggal 14 Desember 2015

Ali Larijani menyambut baik kunjungan Delegasi GKSBDPR-RI- Parlemen Iran yang dipimpin Ketua Delegasi, Mustofa Assegaf. Beliau menyampaikan bahwa hubungan kedua negara antara Indonesia dengan Iran sangat baik. Indonesia dan Iran mempunyai peran besar sebagaimana Indonesia memberikan dukungan atas HAM Iran.



Ketua Parlemen Iran, Dr. Ali Larijani, menerima Delegasi GKSBDPR-RI

Beliau menyampaikan bahwa disayangkan hubungan ekonomi Indonesia dengan Iran kurang baik. Oleh karena itu, perlu dibentuk komisi bersama untuk meningkatkan ekonomi tersebut, terutama fokus pada LNG dan perbankan. Neraca perdagangan Iran - Indonesia pernah mencapai 2 miliar dolar, namun setelah itu tidak pernah lagi. Setelah selesai perundingan nuklir, perlu segera ditingkatkan hubungan ekonomi

Masalah kedua adalah masalah dunia Islam, terorisme, radikalisme. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut atau mengatasi krisis yang dialami negara-negara di sekeliling kita - bisa diadakan acara dialog antar pemikir agama. Bahkan beliau menyampaikan bahwa negara-negara Baratlah yang membuat kita bercerai-berai. Kita saksikan siapa yang dirugikan, tentu negara-negara Islam dan yang diuntungkan adalah Israel.

• Imam Khamenei mengumandangkan perlunya persatuan Islam. Bagi Iran hal ini merupakan suatu strategi. Untuk itu, diharapkan dapat segera diadakan dialog ulama-ulama Islam Iran dan Indonesia.

Beliau menyampaikan bahwa Iran mempunyai peran besar dalam masalah Palestina dan diakui itu merupakan kewajiban untuk membantu negara yang lemah. Negara-negara Islam tidak boleh membiarkan Israel menjadikan Mesjid Al Aqsa jadi ibukota Israel.

Mustofa Assegaf sebagai Ketua Delegasi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Ketua Parlemen untuk menggelar pertemuan ini. Kamijuga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Parlemen Iran serta pihak-pihak lain atas keramahtamahan yang diberikan kepada delegasi.

Kunjungan ini secara umum ditujukan ikut memajukan hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai sector/bidang melalui parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral. Secara multilateral kedua parlemen terlibat aktif dan positif di berbagai forum parlemen seperti di Parliamentary Union of OCI Member Countries (PUIC), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Beliau menyampaikan apresiasi atas kehadiran Delegasi Parlemen Iran pada Konferensi Parlemen Asia-Afrika pada 23 April 2015 di Indonesia dalam kerangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA). Kontribusi

Delegasi Parlemen Iran sangat kontributif terutama terkait dukungan atas kemerdekaan Palestina.

Selain kehadiran Delegasi Parlemen Iran di Konferensi Asia-Afrika, kami juga mengapresiasi partisipasi Delegasi Parlemen Iran dalam Sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Developments Affairs of Asian Parliamentary Assembly (APA) yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta. Secara bilateral, kunjungan ini diharapkan dapat mendorong hubungan yang lebih erat antara kedua parlemen yang diwujudkan antara lain melalui sharing best practices terkait fungsi-fungsi parlemen, pembangunan demokrasi dalam kaitannya dengan ajaran Islam, peran parlemen terhadap isu-isu global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), lingkungan hidup, konflik kawasan dan isu lainnya.

Kerjasama parlemen antara kedua negara sangat penting mengingat parlemen di kedua negara memiliki wewenang krusial dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik baik secara nasional, regional, dan global. Secara singkat, parlemen kedua negara diharapkan terus mendorong kerjasama antar pemerintah (G2G), antar bisnis (B2B) dan antar masyarakat (P2P).

Delegasi menyampaikan selamat atas kesepakatan nuklir antara Iran dan dunia internasional. Kami juga memuji sikap Parlemen Iran yang mendukung kesepakatan tersebut. Kami mengharapkan kesepakatan tersebut dapat menciptakan stabilitas kawasan dan global.

Indonesia merupakan negara demokrasi Muslim terbesar di dunia yang dinilai berhasil membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi. Indonesia dan Iran dinilai sebagai negara yang mempraktekkan prinsip-prinsip Islam dan demokrasi secara bersamaan. Pada kesempatan tersebut, Delegasi juga menyampaikan doa dan harapan agar pemilu legislative Iran mendatang (Februari 2016) berlangsung damai dan membawa hasil-hasil positif bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Iran.

Untuk menanggapi hubungan ekonomi Iran dan Indonesia, Ketua Delegasi memberikan kesempatan menyampaikan gambaran yang telah dicapai dan akan ditempuh ke depan. Duta Besar Indonesia, Yang Mulia Dian Wirengjurit menyampaikan beberapa hal antara lain: dalam rangka

meningkatkan hubungan ekonomi, 5 (lima) menteri Kabinet Kerja Indonesia telah melakukan kunjungan ke Iran. Bahwa Indonesia memerlukan keahlian di bidang teknologi dan energi. Di bidang kelistrikan, Iran telah menandatangani kerjasama untuk melanjutkan proyek PLTG di Belawan, Sumatera Utara. Sedangkan di bidang komoditas, Dubes menyampaikan bahwa sedang dilakukan pendekatan dengan salah satu anggota parlemen Iran untuk mengembangkan proyek garmen yang akan dibangun di Iran untuk dapat menampung tenaga kerja Indonesia. Di bidang penerbangan, Mahan Air telah menjajaki rute penerbangan Teheran-Jakarta-Bali. Dalam hal ini, pihak Indonesia menyampaikan beberapa syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi Mahan Air.

Untuk menutup pertemuan, Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani menyampaikan Selamat kepada Indonesia karena sudah kembali lagi menjadi anggota OPEC.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Kunjungan Delegasi GKSBDPR RI - Parlemen Iran ke Iran pada tanggal 12- 18 Desember 2015, secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif terhadap hubungan bilateral RI – Iran.
2. Peningkatan hubungan ekonomi kedua negara menjadi hal penting yang disampaikan kedua belah pihak.
3. Potensi kemajuan Iran di bidang teknologi dan energi perlu dimanfaatkan oleh Indonesia
4. Konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi isu penting bagi kedua negara dan parlemen.
5. Perlunya dukungan terhadap perdamaian dunia baik tingkat regional dan internasional dengan tidak membeda-bedakan mazhab.
6. ISIS sudah merupakan ancaman global, untuk itu, Indonesia dan Iran mengimbau negara-negara belahan dunia bersatu untuk memerangi dan sepakat memberantas ISIS. Perbuatan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam.

7. Untuk mengatasi masalah-masalah dunia Islam, terorisme dan radikalisme yang terjadi, perlu diadakan dialog antar pemikir agama dan diharapkan dapat diselenggarakan dialog ulama Islam Iran dan Indonesia.

2. SARAN

1. Diharapkan kiranya agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua belah, kiranya dapat dikoordinasikan secara dekat dengan berbagai kalangan terkait di Indonesia.
2. Masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa semakin meningkat dan terbina dengan baik.

Jakarta, 31 Desember 2015
GKSB DPR RI – Parlemen Iran
Ketua Delegasi,

ttd

H. Mustofa Assegaf, M.Si

A-529



**LAPORAN
DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR-RI – PARLEMEN AUSTRIA
KE AUSTRIA
TANGGAL 13 – 19 DESEMBER 2015**

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2015**

LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL
(GKSB)
DPR-RI – PARLEMEN AUSTRIA
KE AUSTRIA, TANGGAL 13 – 19 DESEMBER 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pengiriman Delegasi :

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI – Parlemen Austria untuk melakukan kunjungan ke Austria pada tanggal 13 – 19 Desember 2015.

Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Austria ke Austria dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PIMP/II/2015-2016 tanggal 30 November 2015 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Austria ke Austria dari tanggal 13 sampai dengan 19 Desember 2015.

B. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Austria adalah :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Markus Nari | F-PG/Ketua Delegasi/Kom. V |
|----------------|----------------------------|

2. Agus Susanto	F-PDIP/Anggota/Kom. VII
3. Effendi Sianipar	F-PDIP/Anggota/Kom. IV
4. Asdy Narang	F-PDIP/Anggota/Kom. X
5. Khatibul Umam Wiranu	F-PD/Anggota/Kom. VIII
6. Syahrulan Pua Sawa	F-PAN/Anggota/Kom. V
7. Yandri Susanto	F-PAN/Anggota/Kom. II
8. Handayani	F-PKB/Anggota/Kom. IX
9. Ledia Hanifa Amaliah	F-PKS/Anggota/Kom. VIII
10. Miryam Sri Haryani	F. Hanura/Anggota/Kom. V
11. Iis Muldiyanti	Sekretaris Delegasi
12. Iis Anisa	Sekretaris Delegasi

C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Austria, adalah :

- a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Austria.
- b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara.
- c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan Austria di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara.

D. Misi Delegasi

Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Austria menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan,

investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang dikunjunginya.

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan

Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Kementerian Luar Negeri R.I. dengan tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai isu-isu penting/pending matters terkait hubungan bilateral Indonesia – Austria.

II. ISI LAPORAN

A. Uraian Tentang Negara Austria

a. Hubungan Bilateral Indonesia – Austria

Austria mendukung integritas wilayah RI dan mengharapkan agar hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak tahun 1954 dapat lebih ditingkatkan melalui kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Dalam forum internasional, kedua negara saling memberikan dukungan dalam menghadapi masalah-masalah internasional.

Indonesia memanfaatkan posisi Austria sebagai anggota berbagai organisasi internasional dan regional, khususnya Uni Eropa dan Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Meskipun hubungan bilateral kedua negara berlangsung baik, namun berada dalam kondisi datar. Hal ini dipengaruhi oleh orientasi kebijakan politik luar negeri Austria yang lebih mengutamakan hubungannya dengan sesama anggota UE, negara-negara tetangga yang langsung berbatasan, negara-negara Balkan dan negara-negara berkembangan di kawasan Afrika.

Apresiasi yang disuarakan Austria menyatakan confident mereka terhadap kemampuan Indonesia sebagai a voice of democracy dan menghargai upaya Pemerintah RI untuk terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM di kawasan. Sejumlah isu penting lainnya juga

di-address bersama oleh Indonesia dan UE, penanggulangan illegal logging, terorisme internasional, interfaith dialogue, perkembangan di Papua, ASEAN serta masalah Myanmar.

Namun jika ditelusuri jauh kedalam hubungan aspek bilateral yang ada, negara itu sebaliknya masih terkukung dengan politik proximity yang lebih mendahulukan negara-negara disekitarnya.

Hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara didasarkan atas persetujuan perdagangan yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 5 Mei 1951, Hubungan ekonomi kedua negara telah mengalami peningkatan yang pesat, baik dibidang perdagangan maupun dalam bidang kerjasama ekonomi lainnya. Namun peningkatan hubungan tersebut sebenarnya masih jauh dibawah potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Neraca perdagangan Indonesia-Austria cenderung fluktuatif. Sepanjang tahun 2010-2014, volume perdagangan menunjukkan trend positif sebesar 2,19%.

Tahun 2014, jumlah total perdagangan mencapai US\$383 juta, mengalami penurunan sebesar 12% dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$433 juta dengan defisit untuk Indonesia sebesar US\$302 juta. Sementara per Januari hingga Agustus 2015, total perdagangan mencapai US\$283 juta dengan defisit US\$200 juta.

Tantangan yang dihadapi adalah sulitnya menyeimbangkan neraca perdangan bilateral. Austria memiliki pasar domestik yang kecil dengan konsumen yang bersikap selektif. Selain itu kebijakan pemerintah Austria yang mendahulukan produk dalam negeri juga menjadi kendala yang dihadapi eksportir Indonesia.

Ekspor utama Indonesia ke Austria berupa aneka produk jadi, mesin dan kendaraan, furniture, kerajinan tangan serta bahan mentah. Sedangkan impor Indonesia tercatat mesin dan suku cadang kendaraan, elektronik, produk olahan dan produk kimia.

b. Sistem Politik dan Pemerintahan Austria

- Republik Austria adalah negara demokrasi yang berbentuk federasi dan terdiri dari 9 negara bagian (Bundeslaender).

- Negara dikepalai oleh seorang Presiden dan pemerintahan di kepala oleh seorang Kanselir dibantu oleh Wakil Kanselir dan Menteri-menteri Federal. Menteri-menteri dipilih oleh Presiden atas pertimbangan Kanselir. Presiden Austria dipilih untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya.
- Kanselir secara formal diangkat oleh Presiden namun ditentukan oleh koalisi partai di parlemen. Wakil Kanselir dipilih oleh Presiden atas usulan Kanselir.
- Austria adalah negara demokrasi parlementer yang menganut sistem multi partai. Partai-partai yang ada di Austria adalah : Partai Sosial Demokratik, Partai Rakyat Austria, Partai Liberal Austria, Partai Hijau Austria dan Partai Forum Liberal.

NAME	IDEOLOGY	Seats	%
Social Democratic Party of Austria	Social democracy	52	28%
Austrian People's Party	Conservatism	47	26%
Freedom Party of Austria	Right-wing populism	40	22%
The Greens – The Green Alternative	Green politics	24	13%
Team Stronach	Economic liberalism	11	6%
NEOS – The New Austria	Liberalism	9	5%
TOTAL		183	

- **Parlemen**

Austria menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem perwakilan 2 kamar. Kamar pertama adalah DPR Pusat (Nationalrat) yang merupakan wakil partai-partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu parlemen dengan jumlah 183 orang anggota. Pemilu diadakan setiap 4 tahun sekali berdasarkan sistem perwakilan berimbang. DPR Pusat bersama-sama dengan DPR Negara Bagian (Bundesrat) yaitu kamar kedua bertugas membuat undang-undang nasional.

Bundesrat beranggotakan 63 orang, berasal dari negara-negara bagian dan dapat diganti secara terus menerus sesuai dengan hasil pemilihan DPR negara-negara bagian bersangkutan.

Disamping itu terdapat Bundesversammlung (gabungan Bundesrat dan Nationalrat) yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dimana hanya

bersidang jika diperlukan, terutama untuk peristiwa nasional yang penting di Austria, seperti pelantikan presiden dan Gemeinderat (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) yang anggotanya dipilih rakyat di daerah kabupaten dengan tugas mengadakan pemilihan kepala daerah kabupaten. Dalam beberapa hal tertentu, daerah kabupaten mempunyai hak-hak otonomi.

- **Sistem Pemerintahan**

- a) Bundespresident (Presiden Federal)

Presiden Federal dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden bertanggung jawab kepada Bundesversammlung. Presiden mengangkat Perdana Menteri dan anggota kabinetnya dan Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Austria;

- b) Bundesregierung (Pemerintah Federal)

Pemerintah Federal dipimpin oleh Perdana Menteri (*Bundeskanzler*) dengan dibantu oleh wakil PM dan menteri serta beberapa sekretaris negara. Menurut kebiasaan, Perdana Menteri yang ditunjuk adalah ketua partai politik yang terkuat dan mempunyai wakil terbanyak dalam Parlemen Federal. Perdana Menteri bertanggungjawab kepada Nationalrat;

- c) Landesregierung (Pemerintah Negara Bagian)

Kepala pemerintahan negara bagian adalah seorang gubernur (*Landeshauptmann*) yang dipilih oleh DPR negara bagian yang bersangkutan;

- **c. Sekilas Perkembangan Dalam Negeri Austria**

- Kebijakan ekonomi luar negeri Austria mengutamakan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara Uni Eropa dan Balkan. Lebih dari 70% perdagangan dilakukan dengan negara-negara UE, 5% dengan Amerika Serikat, sementara dengan negara-negara ASEAN baru mencapai 1,3%.
 - Pertumbuhan ekspor Austria ini pada umumnya ditopang oleh

manufaktur dan ekspor yang memperoleh keuntungan dari ekspansi perekonomian dunia dan kemampuan kompetitif harga yang tinggi perusahaan-perusahaan Austria.

- Ekonomi Austria sebagaimana negara industri pada umumnya, sektor jasa memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Lebih dari 2/3 nilai tambah dan lapangan kerja berasal dari sektor ini.
- Sementara itu industri tetap berperan penting dengan kontribusi lebih dari 30% terhadap GDP. Secara tradisional, Austria memiliki ketangguhan di bidang barang-barang setengah jadi seperti besi, baja, kertas, mesin, turbin dan komponen industri mobil. Selain itu, perusahaan-perusahaan dengan teknologi tinggi mulai bermunculan dewasa ini untuk sektor-sektor tertentu pasar.
- Kebijakan utama dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dilaksanakan pemerintah Austria adalah Peningkatan pengembangan riset, Fleksibilitas pasar tenaga kerja, Perpajakan nasional, dan Peningkatan investasi bidang manufaktur.
- Saat ini, masalah pengungsi sedang menjadi ~~bahasan di Eropa, tak~~ terkecuali di Austria. Dengan banyaknya jumlah pengungsi yang masuk dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan ke Eropa, diperlukan kebijakan khusus dalam menangani masalah tersebut.

B. Program Kegiatan

- Pertemuan dengan Dubes RI di Wina beserta jajarannya
Diskusi untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai hubungan bilateral Indonesia- Austria serta isu-isu dalam negeri Austria, khususnya yang memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi legislatif.
- Pertemuan dengan Austria – Indonesia Parliamentary Friendship Group GKSBN DPR RI – Parlemen Austria ingin mengetahui lebih banyak mengenai mekanisme kerja yang berlaku di Parlemen Austria terutama yang terkait dengan bidang legislasi, pengawasan, serta penganggaran. Selain itu GKSBN juga ingin mengetahui tentang peluang kerjasama yang bisa dikembangkan oleh DPR RI dan Parlemen Austria.

C. Hasil-hasil Kunjungan

Dalam kunjungan bilateral Grup Kerjasama Bilateral (GKSBI) DPR RI ke Austria tersebut, Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSBI) DPR-RI – Parlemen Austria telah mengadakan pertemuan dengan Parlemen Austria, selain pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Austria.

A. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Wina

Delegasi diterima oleh Duta Besar RI Y.M. Rachmat Budiman beserta seluruh jajaran KBRI di Wisma Duta pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan oleh Dubes penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi KBRI Wina, baik sebagai perwakilan bilateral yang diakreditasikan untuk Austria dan Slovenia maupun sebagai perwakilan multilateral yang diakreditasikan untuk PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya yang berkedudukan di Wina.

Dubes/Watap RI juga memberikan informasi mengenai isu-isu yang saat ini mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah dan publik Austria seperti lonjakan jumlah pengungsi yang masuk dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan ke Eropa serta pemberlakuan undang-undang baru mengenai Islam.

Ketua Delegasi DPR RI, Markus Nari menyampaikan tujuan utama kunjungan ke Austria yaitu untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama DPR RI dan Parlemen Austria sebagai bagian dari pelaksanaan parliamentary diplomacy. Delegasi DPR RI juga akan menyampaikan secara langsung usulan memorandum of understanding (MoU) mengenai peningkatan kerjasama DPR RI dan Parlemen Austria.

Dalam sesi tanya jawab, Anggota delegasi berpartisipasi aktif dan menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain :

- Ibu Miryam Haryani menanyakan tentang dampak dari serangan teroris di Paris tanggal 14 November 2015 terhadap kebijakan Pemerintah Austria kepada pemeluk agama Islam, termasuk yang berasal dari Indonesia, pandangan masyarakat di Austria terhadap Indonesia serta

dalam bidang ekonomi, apa saja produk yang memiliki nilai jual tinggi di Austria.

- Bapak Asdy Narang menanyakan tentang kerjasama dalam hal pendidikan, termasuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi di perguruan-perguruan tinggi di Austria
- Bapak Khatibul Umam juga menanyakan tentang perkembangan beasiswa dan kecenderungan pertambahan jumlah mahasiswa yang belajar di Austria
- Bapak Handayani menanyakan mengenai buruh/sistem pengupahan di Austria serta Pengaturan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat di Austria
- Bapak Syahrulan Pua Wasa menanyakan tentang payung hukum bagi profesi arsitek juga organisasi profesi dan apakah ada kerjasama antara Indonesia dan Austria khususnya di Bidang Jasa Konstruksi
- Bapak Effendi Sianipar menanyakan tentang kebijakan pemerintah Austria dalam pengelolaan penataan agrowisata, penataan hutan serta penataan ikan

Dubes/Watap RI memberikan penjelasan tentang kebijakan Pemerintah Austria sebagai berikut :

- Austria memandang Indonesia cukup penting, hal tersebut bisa diamati dari kunjungan Presiden Austria ke Indonesia pada tahun 2010. Hubungan Indonesia dengan Austria juga cukup baik, termasuk dalam hubungan multilateral dimana Austria merupakan tuan rumah dari beberapa organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggotanya.
- Dalam hal terorisme dan kelompok radikal, seperti ISIS, tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat di Wina. Masyarakat di Wina terdiri dari berbagai macam etnis dan dapat hidup berdampingan dengan damai, termasuk dengan penganut Islam. Penganut Islam di Austria termasuk banyak, sekitar 6 % dari jumlah penduduknya.
- Dijelaskan pula bahwa untuk penanganan pengungsi, pemerintah

telah memiliki sistem bahwa pengungsi langsung diarahkan masuk ke tempat-tempat penampungan khusus sementara (3 tahun). Setelah itu, akan dilakukan evaluasi, apabila negara asalnya sudah kondusif akan dikembalikan ke negaranya masing-masing.

- Komunitas Agama di Austria cukup baik. Masyarakat Islam Indonesia memiliki kelompok pengajian yaitu Wapena. Untuk ummat Kristiani juga memiliki komunitas sendiri.
- Pemerintah Austria mengakui hukum Islam di Austria dan masyarakat Austria juga termasuk yang toleran terhadap pemeluk agama-agama lain. KBRI juga tengah menginisiasi adanya interfaith dialogue, sehingga hubungan antar agama dapat tetap terjalin dengan harmonis.
- Dalam hal ekonomi, Ekspor Indonesia masih minus ke Austria. Hal tersebut dikarenakan dari Austria mengekspor machinery yang high technology ke Indonesia sementara Indonesia mengekspor garment, furniture, alat-alat dapur, alas kaki yang nilai jualnya lebih rendah bila dibandingkan produk ekspor Austria.
- KBRI tengah mengupayakan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
- Terkait dengan kerjasama pendidikan, disampaikan bahwa jumlah mahasiswa yang belajar di Austria terus bertambah dan bidang study yang dipelajari juga sudah beragam. Tidak hanya musik dan seni, tetapi juga medis, tata air, penataan kehutanan, struktur bangunan dan lain-lain.
- Ada lembaga yang disebut Asia Unilet Network yang mengelola pemberian beasiswa untuk mahasiswa Asia. Beberapa Universitas di Indonesia juga sudah bekerjasama, diantaranya kerjasama antara Universitas Wina dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam hal studi tentang konstruksi bangunan, arsitektur dan lain-lain.
- Kesempatan pemberian beasiswa cukup banyak dari Austria, terutama bagi mahasiswa yang memiliki proyek penelitian yang dapat memberikan banyak manfaat.
- Dalam hal pengupahan/perburuhan, di Austria, pengupahan selalu

ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali. Standar minimum upah buruh adalah 1100 Euro.

- Untuk pelayanan jaminan kesehatan, ada asuransi publik WGKK untuk masyarakat menengah ke bawah yang ditanggung oleh pemerintah dan ada juga asuransi swasta untuk masyarakat menengah ke atas, namun pelayanannya sama untuk semua golongan.
- Terkait dengan profesi arsitek, di Austria telah ada payung hukumnya. Di Austria semua pekerjaan harus dilakukan oleh ahli yang telah memiliki lisensi, termasuk arsitek.
- Disampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Austria terhadap aturan sangat baik, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada.
- Terkait dengan pengelolaan agrowisata, penataan hutan maupun penataan ikan, dijelaskan bahwa pemerintah Austria telah sangat baik dalam penataan hutan serta penataan ikan, walaupun tidak memiliki lautan, namun ada danau-danau yang menghasilkan ikan untuk dikonsumsi masyarakat. Subsidi diberikan bukan hanya dalam bidang pertanian tetapi juga di bidang lainnya. Ada kelompok-kelompok semacam koperasi yang mengelola hasil pertanian masyarakat, seperti untuk pengelolaan wine, masing-masing daerah memiliki produk wine yang berbeda-beda.
- Untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia-Austria, seringkali dilakukan exhibition atau pameran. Yang terdekat adalah pada tanggal 14 – 17 Januari 2016, akan diadakan Exhibition di Wina, dimana akan ditampilkan kebudayaan/produk-produk Indonesia disana. Dipersilakan kepada para delegasi apabila ada yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut, dapat mengirimkan perwakilan.
- Selain itu, akan diadakan promosi tim kesenian Indonesia dalam business meeting pada tanggal 19 Maret 2015 dengan tema "wonderful Indonesia for the world".



Gb. 1: Diskusi dengan Dubes RI di Wina dan jajarannya



Gb.2: Foto Bersama dengan Dubes RI Y.M. Rachmat Budiman

B. Pertemuan dengan Kelompok Persahabatan Austria untuk wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Oceania.

- a. Delegasi GKSBD diterima oleh Ketua Kelompok Persahabatan Austria untuk wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Oceania Dr. Andreas Karlsbock, dari Austrian Freedom Party-FPO dan dihadiri oleh:

1. Elisabeth Hakel (Social Democratic Party of Austria- SPO)
2. Wolfgang Gerstl (Austrian People's Party- OVP)
3. Dr. Jessi Lintl (Independen)
4. Dr. Johannes Hubner (Austrian Freedom Party-FPO)
5. Dr. Alex Kasseger (Austrian Feedom Party-FPO)

Dalam pertemuan juga dihadiri oleh Hansjorg Deng, seorang pengusaha di bidang energi yang hadir atas undangan Parlemen Austria.

- b. Mengawali pertemuan, Ketua Delegasi DPR RI, Markus Nari menyampaikan tujuan kunjungan yaitu untuk meningkatkan kerjasama antara kedua parlemen sebagai bagian dari penguatan hubungan dan kerjasama bilateral Indonesia-Austria. Ketua Delegasi juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastuktur merupakan salah satu program utama Pemerintah RI saat ini dan mengharapkan pada kunjungan ini juga dapat dibahas kerjasama di bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- c. Ketua Delegasi juga menyampaikan naskah usulan memorandum of understanding (MoU) mengenai peningkatan kerjasama DPR RI dan Parlemen Austria kepada pihak Parlemen Austria dan mengundang anggota Parlemen Austria untuk berkunjung ke Indonesia.



Gb.3: Sambutan Ketua Delegasi, Bapak Markus Nari



Gb. 4 : Penyerahan Draft MoU Kerjasama Antar Parlemen

- d. Dalam sambutan balasan, Dr. Andreas Karlsbock menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Delegasi DPR RI serta menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap upaya peningkatan kerjasama kedua parlemen. Juga disampaikan apresiasi atas perkembangan demokrasi dan toleransi di Indonesia sebagai Negara dengan keragaman agama dan suku bangsa. Disampaikan bahwa di Austria juga terdapat kebebasan berpendapat dan beragama dan perlindungan terhadap minoritas.
- e. Terkait dengan usulan MoU, Dr. Karlsbock menyatakan akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Ketua Parlemen Austria untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Akan disampaikan tanggapan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.
- f. Pada sesi diskusi/tanya jawab, beberapa hal yang diangkat oleh anggota Parlemen Austria, antara lain :
 - Keterwakilan kelompok etnis di DPR RI;
 - Kebijakan Indonesia di bidang penanggulangan terorisme;
 - Situasi energi di Indonesia, khususnya kebutuhan listrik untuk industri dan rumah tangga;

- Struktur organisasi dan pembagian komisi di DPR RI, keterwakilan Perempuan di DPR.



Gb. 5 : Suasana Diskusi



Gb. 6 : Suasana Diskusi

g. Menanggapi pertanyaan dari Parlemen Austria, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Terkait dengan keterwakilan kelompok etnis di parlemen, disampaikan bahwa setiap daerah memiliki perwakilan di parlemen.

Contoh realnya dalam delegasi yang mengikuti kunjungan ke Austria saat ini ada yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Sumatera maupun dari Indonesia Timur. Dalam Parlemen Indonesia ada suatu Dewan Perwakilan Daerah, dimana setiap daerah diwakili oleh 4 orang wakilnya.

- Terkait dengan terorisme, dijelaskan bahwa Indonesia penduduknya mayoritas Islam, dan tidak kebijakan Indonesia tidak mendukung sama sekali terorisme. Jangan dikaitkan antara Islam dan terorisme, karena Islam dan terorisme adalah dua hal yang sangat berbeda. Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya adalah Islam, tetapi pernah pula menjadi korban terorisme. Jadi, Islam bukanlah pelaku terorisme.
- Terkait dengan energi, disampaikan bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk yang besar dan membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, delegasi mengharapkan masukan dalam pengelolaan energi terbarukan yang sangat maju di Austria.
- Terkait dengan struktur organisasi dan komisi di DPR RI, disampaikan bahwa jumlah anggota DPR RI berjumlah 560 orang yang dipilih langsung oleh masyarakat. Terdapat 11 komisi yang membidangi berbagai bidang, seperti bidang luar negeri, bidang pemerintahan dalam negeri, bidang hukum, bidang infrastruktur, bidang agama dan lain sebagainya. Semua anggota DPR menjadi salah satu anggota Komisi, kecuali Pimpinan DPR RI. Selain komisi, ada pula Badan-badan yang dibentuk sebagai alat kelengkapan dewan, antara lain Badan Urusan Rumah Tangga, Badang Anggaran, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.
- Terkait dengan keterwakilan perempuan di Parlemen, disampaikan bahwa saat ini jumlah Anggota Perempuan di DPR RI mencapai 17,9% dari total anggota DPR. Diinformasikan bahwa dalam Undang-Undang telah ditetapkan setiap partai politik harus mencantumkan minimal 30% calon anggota legislatifnya adalah perempuan. Walaupun dalam kenyataannya, kuota 30% tersebut belum dapat direalisasikan dalam parlemen, karena pemilihan

umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

h. Sementara hal-hal yang diangkat oleh delegasi DPR RI pada sesi diskusi antara lain :

- **Dampak serangan terorisme** di Paris terhadap kebijakan Austria di bidang pemberantasan terorisme
- Kebijakan Austria terhadap refugee crisis yang saat ini tengah terjadi di Eropa dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan
- Sikap Parlemen Austria terhadap refugee crisis dan bagaimana cara menjelaskan krisis tersebut kepada konstituen
- Serangan militer untuk menghancurkan ISIS dan dampaknya terhadap kemungkinan penurunan jumlah pengungsi asal Suriah yang masuk ke Eropa
- Keterwakilan perempuan di Parlemen Austria

i. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan delegasi DPR RI disampaikan antara lain.

- Serangan teroris di Paris tidak banyak mempengaruhi masyarakat Austria.
- Terkait dengan refugee crisis, peran parlemen di Austria kurang berpengaruh, karena semua kebijakan Pemerintah di Austria harus mengacu pada kesepakatan di Uni Eropa. Karena Kebijakan Uni Eropa menerima para pengungsi dengan tangan terbuka, maka semua negara harus mematuhiinya. Walaupun di dalam negeri sendiri sebenarnya banyak masyarakat yang kurang sependapat dengan kebijakan tersebut.
- Terkait dengan ISIS, memang tidak ada hubungan langsung antara pemberantasan ISIS dengan berkurangnya jumlah pengungsi asal Suriah, namun dalam hal ini Pemerintah Austria harus mematuhi kebijakan di Uni Eropa yang memerangi ISIS.
- Terkait dengan keterwakilan perempuan di Parlemen Austria disampaikan bahwa harapannya adalah sebesar 50% namun

kondisi ideal tersebut belum dapat tercapai saat ini. Diharapkan di masa yang akan datang, keterwakilan perempuan dapat mencapai 50%.

- j. Menanggapi undangan dari GKSB DPR RI – Parlemen Austria, disampaikan bahwa Parlemen Austria akan mengagendakan kunjungan ke Indonesia tahun depan.



Gb. 7 : Bapak Khatibul Umam Wiranu dalam diskusi



Gb. 8 : Ibu Ledia Hanifah dalam diskusi



Gb. 9. Bapak Yandri Susanto dalam diskusi

- k. Dibahas juga mengenai pandangan Parlemen Austria tentang Parlemen Uni Eropa yang dinilai telah membuat proses birokrasi dalam Parlemen menjadi semakin panjang dimana kebijakan harus melalui proses di Parlemen Uni Eropa, Parlemen Nasional (Nationalrat) untuk dilanjutkan ke Perwakilan Negara bagian (Bundestat) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Gemeinderat).
- l. Selain itu kedua pihak juga membahas mendekati keterwakilan perempuan dalam politik dimana Parlemen Austria mengakui kemajuan Indonesia terutama terkait pembentukan kluang politik bagi perempuan tetapi hanya untuk duduk dalam kursi Parlemen namun juga dalam kepengurusan Partai Politik.



Gb. 10: Foto Bersama Delegasi Parlemen Austria



Gb. 11 Penyerahan souvenir oleh Ibu Miryam Sri Haryani

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kunjungan Delri GKSBDPR RI - Parlemen Austria ke Austria pada tanggal 13 – 19 Desember 2015, secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif bagi Indonesia. Kunjungan ini dinilai positif untuk menunjukkan dukungan badan legislatif terhadap hubungan bilateral RI – Austria, khususnya terhadap kalangan industri.
2. Dalam kunjungan ini diidentifikasi sejumlah potensi kerjasama antara kedua negara diantaranya untuk memanfaatkan kemajuan Austria di bidang infrastruktur.
3. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi dan perekonomiannya saat ini, telah memberikan arti positif bagi Austria yang secara konsisten mendukung integritas wilayah R.I. dan menilai Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan.
4. Sejumlah kerjasama di berbagai bidang di antaranya adalah dalam hal energi dan pembangunan infrastruktur telah dilakukan antara Indonesia – Austria, Pemerintah R.I. diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan investasi Austria di Indonesia.

B. SARAN

1. Merangkum berbagai catatan dari hasil kunjungan Delegasi GKSBDPR RI-Parlemen Austria di Austria tersebut, diharapkan kiranya agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua pihak dan khususnya juga menjadi "concern" dari seluruh anggota Delri GKSBDPR RI, kiranya dapat dikoordinasikan secara dekat dengan berbagai kalangan terkait pemerintah di Indonesia, untuk dapat ditindaklanjuti secara nyata guna mendapatkan kemajuan yang berarti bagi pengembangan kunjungan kerjasama bilateral antara RI dan Austria, yang tentunya lebih ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia.
2. Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSBDPR) ini diharapkan kedua belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya

kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik..

3. Dengan penyampaian Draft Memorandum of Understanding terkait hubungan antar Parlemen, diharapkan hubungan antara kedua parlemen dapat lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, baik dalam hal saling kunjung, maupun dalam bentuk lainnya.

Jakarta, 31 Desember 2015
GKSB DPR RI – Parlemen Austria
Ketua Delegasi

ttd

DR. Ir. Markus Nari, M. Sc
A-314